

Arman Maulana, S.Sy., M.M
Siti Rosmayati, SST., M.M



SURVEY INTERNASIONAL TENTANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Karakter ini sudah menjadi budaya bangsa yang perlu kita pelajari untuk kita ambil manfaatnya



**SURVEY
INTERNASIONAL
TENTANG KEBIJAKAN
PENDIDIKAN**



Arman Maulana, S.Sy., M.M
Siti Rosmayati, SST., M.M

**SURVEY INTERNASIONAL
TENTANG
KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

Penulis: 1. Arman Maulana, S.Sy., M.M
2. Siti Rosmayati, SST., M.M

Editor: Arman Maulana, S.Sy., M.M

Tata Letak: Arman Maulana, S.Sy., M.M

Sampul: Guepedia.com

ISBN : 978-623-283-071-4

Diterbitkan Oleh:

Guepedia

The First On-Publisher in Indonesia

E-mail: guepedia@gmail.com

Fb. Guepedia

Twitter. [@guepedia](https://twitter.com/guepedia)

Website: www.guepedia.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All right reserved

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah negara berpengaruh besar, tentunya banyak hal yang mungkin saja dapat diambil sisi-sisi yang sekiranya baik untuk dijadikan referensi dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pendidikan di negara kita. Ternyata sudah menjadi kultur budaya yang sangat mengakar dalam sejarah bahwa pendidikan menjadi tugas bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat tidak mau kalau pendidikan diatur oleh pemerintah pusat, bahkan oleh pemerintah negara bagian, bahkan oleh pemerintah lokal sekalipun. Masyarakat merasa memiliki hak yang sangat kuat untuk menentukan sistem pendidikan seperti apa yang paling tepat untuk masyarakat mereka.

Mereka menganggap tantangan yang dihadapi oleh setiap komunitas tidaklah sama, jadi sistem pendidikan juga tidak boleh atau tidak perlu disamakan antara satu kota dengan kota lain, antara satu state dengan state lain. Kita melihat masih terlalu banyak problema dan ketidakpuasan diseperti persoalan pendidikan ini, tetapi sebagai bangsa yang besar dan sudah tua mereka sangat berpengalaman dalam memberikan respon yang cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karakter ini sudah menjadi budaya bangsa yang perlu kita pelajari untuk kita ambil manfaatnya.

Buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Penulis tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan buku ini terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun/konstruktif demi perbaikan buku kedepannya.

Bandung, 8 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Bab 1 Pengantar	6
Bab 2 Masalah Konseptual Dan Teoretis Oleh Grant Harman Kebijakan	17
Bab 3 Survey Internasional Tentang Kebijakan Pendidikan Di Bebera Negara	22
Bab 4 Kebijakan Pendidikan Di Amerika Serikat.....	40
Bab 5 Kebijakan Pendidikan Di German Barat	81
Bab 6 Kesimpulan	115
Daftar Pustaka	124
Sinopsis.....	125
Tentang Penulis	127



BAB 1 PENGANTAR

A. Survey Internasional Tentang Kebijakan Pendidikan

Meskipun ada banyak buku yang menggambarkan dan / atau menganalisis sistem pendidikan di berbagai negara, secara umum buku-buku itu cenderung sedikit menyinggung kebijakan pendidikan. dan tampak sebelumnya tidak ada satu volume yang menyatukan kumpulan studi terbaru tentang kebijakan pendidikan di negara- negara yang dicakup oleh buku ini, yaitu, australia, perancis, jepeng, swedia, inggris, amerika serikat, dan jerman barat. karenanya satu motivasi untuk buku ini: untuk mengisi celah

penting dalam literatur yang ada. pemberitahuan kedua berasal dari pengalaman beberapa tahun terakhir (katakanlah, kira-kira dekade terakhir) di mana, hampir tidak dapat diragukan, perubahan besar telah terjadi dalam sistem ekonomi dan sosial di banyak negara, mungkin sebagian besar negara di dunia, tentu saja termasuk semua yang dicakup oleh perubahan volume ini yang telah memunculkan re-orientasi utama kebijakan pendidikan di setiap negara-negara ini.

Setelah sebelumnya krisis minyak berturut-turut, tren sejarah menuju kemakmuran ekonomi yang lebih besar tampaknya berhenti ketika tingkat pertumbuhan ekonomi menurun, kadang-kadang mencapai nol atau bahkan mencatat nilai-nilai negatif. sejak lama bahwa kebijakan ekonomi negara dapat secara luas memilih pertukaran antara tingkat pengangguran yang lebih tinggi atau tingkat inflasi yang lebih tinggi memberi jalan ke serangkaian tahun, di semua negara yang dicakup oleh volume ini, di mana pengangguran dan inflasi berkorelasi positif dan keduanya mencapai nilai yang sebelumnya tidak tinggi. meskipun tingkat inflasi pada akhirnya mereda dan kembali ke angka tunggal, pengangguran terus meningkat di semua negara yang bersangkutan, terlepas dari kecenderungan penetapan seperti pensiun dini, mengurangi lembur, biasanya kerja seminggu yang lebih pendek, dan periode yang lebih lama dihabiskan dalam pendidikan.

Dampak dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah, baik secara langsung atau tidak langsung dan baik segera atau di masa mendatang, sektor pendidikan mendapati diri mereka kehilangan tingkat pendanaan yang seringkali tidak selalu terungkap dalam perubahan signifikan dalam anggaran pemerintah pusat karena pendidikan tidak selalu merupakan tanggung jawab utama pemerintah pusat, terutama di negara-negara federal seperti Australia, Amerika Serikat, dan Jerman barat. di setiap negara, bagaimanapun, pendidikan adalah salah satu pembelanjaan dana publik terbesar dan karenanya tidak dapat berharap untuk menghindarkan diri dari pengaruh depresi ekonomi yang semakin dalam.

Sudah banyak contohnya bahwa pendidikan mampu membawa perubahan dalam berbagai aspek. Entah itu dalam aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan tentu saja dalam penguasaan wawasan keilmuan. Jepang adalah salah satu negara yang sukses menjadi bangsa yang besar dalam hal pendidikan dan pengetahuan dengan mengirim generasi mudanya sekolah di luar negeri. Dari negeri matahari terbit ini telah ditunjukkan bagaimana meluasnya pendidikan secara cepat mampu membantu terjadinya modernisasi Jepang dan di beberapa negara. Negara ini dalam kenyataannya mempunyai peraturan wajib belajar di

seluruh negeri dan sudah menjadi nomor dua sesudah Amerika dalam hal jumlah siswa yang menerima pendidikan tinggi.

Bagaimana dengan Amerika Serikat? Pendidikan di Amerika Serikat sudah dirintis pada masa Amerika Serikat belum terbentuk. Negara ini malah belum memproklamasikan kemerdekaannya ketika College-college sebagai dasar pendidikan Amerika didirikan oleh pemerintah kolonial. Pada masa-masa awal, rakyat di seluruh koloni sudah sadar bahwa yang paling penting untuk masa depan adalah dasar-dasar pendidikan dan budaya Amerika.

Beberapa kesamaan dan tujuan utama kebijakan pendidikan di tujuh negara. Kerangka kerja dan hukum suatu negara harus mendominasi setiap kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah nasional. Dari tujuh negara hanya di Perancis, Jepang dan Swedia pemerintah pusat melakukan kontrol penuh atas sektor pendidikan. Untuk mengembangkan minat dalam pendidikan, sering kali terdapat kendala khususnya dalam hal keuangan. Selain itu, di beberapa negara ada yang mengharuskan pendidikan prasekolah. Misalnya, di Inggris mewajibkan anak usia 5 tahun untuk mengikuti kegiatan prasekolah, 6 tahun di Perancis, 6 atau 7 tahun di Jerman Barat.

Negara-negara lain seperti Prancis dapat memberikan instruksi formal atau kegiatan pada anak-anak sebelum memulai sekolah formal yang berpusat pada permainan yang berhubungan dengan pendidikan. Di Prancis dan AS hampir 100 persen anak-anak memiliki pengalaman seperti itu dalam satu atau dua tahun tetapi di tempat lain penerimaan lebih rendah. Di Perancis, kebijakan sekarang mengarah pada peningkatan dalam persentase anak berusia dua tahun di suatu lembaga semi- pendidikan seperti itu sedangkan di Inggris sebagian besar dilarang oleh hukum untuk meninggalkan anak-anak dalam lingkungan seperti itu di bawah usia 3 tahun. Di semua negara, persentase anak-anak dari rumah kelas menengah yang cenderung lebih besar memiliki pengalaman seperti itu daripada anak-anak.

Sebagian besar sekolah dasar berdiskusi berkaitan dengan gaya mengajar dan metode pengajaran "progresif", di mana Inggris dianggap telah memimpin. Shipman menunjukkan, bahwa tingkat perubahan pada kenyataannya sangat terbatas. Tren serupa terhadap pendekatan yang lebih berpusat pada anak untuk mengajar di sekolah dasar terlihat jelas di setiap negara lain dan selalu memunculkan oposisi yang menunjukkan pandangan yang mengakar. Di mana-mana ada kekhawatiran bahwa bahasa dan matematika harus tampak menarik dan relevan bagi anak-anak kecil dan juga standar prestasi tidak

boleh jatuh. Khususnya di Swedia, tetapi juga di Perancis dan juga Jerman Barat, menjadi semakin umum untuk anak-anak mulai belajar bahasa asing (biasanya bahasa Inggris) ketika di sekolah dasar, sedangkan sebagian kecil sekolah di Inggris belajar bahasa Prancis dan bahkan lebih sedikit lagi di Australia atau Amerika Serikat.

B. Iklim Pendidikan

Tahun-tahun yang sama di tengah kemuraman ekonomi terlihat tumbuh keraguan tentang pendidikan: apakah semakin banyak pendidikan semakin meningkatkan kebaikan universal yang telah lama diproklamirkan oleh para pendidik dan bahwa masyarakat pada umumnya telah menerima? jika demikian, mengapa semakin banyak anak muda tampaknya semakin terasing oleh sistem pendidikan. misalnya, di setiap negara yang ditangani di sini, pendidikan tinggi sebagian besar masih didominasi oleh kelas menengah, dengan strata masyarakat yang kurang beruntung yang diwakili hanya sedikit saja? mengapa kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi semakin dituduh tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti yang paling nampak dirasakan oleh banyaknya anak muda, di setiap negara, memilih untuk mempelajari mata pelajaran seni daripada sains, sedangkan kebutuhan nasional tampaknya lebih banyak untuk para ilmuwan, insinyur, dan teknolog. walaupun pengurangan

jumlah ini di mana-mana berarti bahwa lebih sedikit guru akan diperlukan akan ada tekanan pada beberapa staf sekolah untuk pensiun dini dan beberapa sekolah dan perguruan tinggi harus menutup sepenuhnya, itu seharusnya, juga dan merupakan harapan, membuka jalan bagi peningkatan peluang dalam hal akses yang lebih mudah ke pendidikan, lebih sedikit tekanan pada tempat dan ruang, lebih sedikit kendala keuangan, pada saat penulisan angka yang semakin mendekati mendekati tahun kedua mereka dan beberapa perubahan yang lebih traumatis, baik atau buruk, di sekolah menengah atau tingkat pendidikan tinggi, masih ada di depan.

C. Tujuan

Tujuan buku ini bukan hanya untuk menggambarkan kebijakan pendidikan di masing-masing negara tetapi untuk fokus pada pengembangan kebijakan itu dari waktu ke waktu, seperti yang terkait dengan pengaturannya dalam masyarakat dan ekonomi nasional yang relevan, dan untuk mengeksplorasi tren yang sebanding dan berlawanan pengaruh di antara mereka. di dunia modern yang ditandai oleh arus komunikasi yang tampaknya seketika dan dengan transmisi informasi yang cepat dari segala jenis, semakin tidak mungkin bagi satu negara untuk tetap terisolasi dari pembangunan yang memengaruhi negara-negara lain yang sering menghadapi masalah

serupa. Oleh karena itu, tema penting dalam buku ini akan berhubungan dengan penglihatan umum yang mempengaruhi sejumlah negara, dan terkadang semua negara yang bersangkutan. pada waktu yang sama perbedaan nasional dan bahkan subnasional tetap ada karena setiap negara menetapkan perkembangan baru apa pun dalam konteks latar belakang sejarah, politik dan sosial sendiri.

D. Studi Perbandingan

Di bidang pendidikan, tidak ada yang sangat baru tentang studi perbandingan negara dan dalam studi tersebut tidak ada yang sangat baru tentang fokus yang sangat tertarik dalam interaksi antara lembaga pendidikan dan masyarakat yang lebih luas, dan kekuatan-kekuatan yang nantinya dapat diberikan pada yang pertama. yang dapat dianggap sebagai refleksi yang adil dari apa yang biasanya dilihat sebagai penekanan utamanya yaitu pentingnya memahami karakter nasional suatu negara untuk dapat sepenuhnya menghargai sistem pendidikannya. Demikian pula, penekanan awal adalah pada keunikan sistem pendidikan daripada pada kesamaan mereka akan ditemukan begitu terjalin sehingga mereka hampir tidak dapat dipisahkan. kebijakan pendidikan, dan pembuat kebijakan, akan terlihat bereaksi baik terhadap tren nasional maupun pengaruh internasional. jika keraguan serius diungkapkan tentang dasar-

dasar ideologis atau teoretis pada banyak studi banding yang diterbitkan dalam bidang pendidikan, mereka mungkin merujuk pada 'pinjaman budaya': masalah-masalah yang berkaitan dengan, misalnya, peningkatan usia sekolah yang meninggalkan sekolah akan berbeda di setiap negara yang termasuk dalam buku ini. Namun, jika tujuan penting penelitian komparatif tetap 'membantu pemecahan masalah atau pembuatan kebijakan' dan jika beberapa studi terbaru, dan bahkan lebih sedikit koleksi studi, kebijakan pendidikan saat ini ada, maka motivasi untuk volume saat ini menjadi jelas.

E. Tugas-tugas Kebijakan Untuk Tahun 1980-an

Konferensi melanjutkan untuk menentukan tugas yang harus dihadapi oleh kebijakan pendidikan pada 1980-an, di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu:

1. menanggapi kebutuhan baru di tingkat lokal dan masyarakat,
2. berkontribusi untuk merevitalisasi ekonomi dengan menghasilkan 'hak' 'Jenis tenaga kerja yang sangat berkualitas dan berkontribusi pada pelatihan lebih lanjut dari angkatan kerja dalam konteks teknologi yang berubah dengan cepat,
3. mempertahankan tingkat inovasi teknologi yang memadai melalui kemajuan penelitian ulang ilmiah, membantu mempromosikan kesetaraan sosial yang lebih besar, pada

saat bagian-bagian populasi yang lebih miskin terkena dampak paling parah dari situasi ekonomi

Dari pengarsipan rangkuman ini, hampir tidak dapat diragukan bahwa mereka berlaku untuk setiap satu dari tujuh negara yang termasuk dalam jilid ini dan bahwa mereka berlaku untuk tingkat pendidikan selain pendidikan tinggi, yaitu tentu saja untuk sekolah menengah dan setidaknya dalam beberapa hal untuk sekolah dasar dan bahkan (dalam istilah, misalnya, dikutip kriteria ekuitas) untuk pra-sekolah dasar. Penekanan 'praktis' semacam itu mungkin dapat dilihat sebagai pelengkap yang bermanfaat bagi pertimbangan yang lebih teoretis atau ideologis yang disebutkan di atas dan keduanya bersama-sama dapat dilihat sebagai membentuk lapisan-belakang yang cocok untuk masing-masing negara yang mengikuti.

F. Struktur Buku

Pilihan negara mana yang termasuk dalam arah buku ini diikuti dari dua volume sebelumnya yang diterbitkan oleh Croom Helm di mana editor saat ini terlibat sebagai kontributor. tentu saja akan mudah untuk mengkritisi pilihan atau memperdebatkan kasus untuk dimasukkannya satu atau lebih negara lain (Italia? Kanada?) kendala ruang dan ukuran membatasi jumlah negara yang dapat dicakup dan, terlepas dari kemanfaatan, bahwa

tujuh yang dipilih adalah semua negara maju dengan sistem pendidikan yang sangat maju dan perpaduan yang kompleks antara kebijakan dan masalah pendidikan. lebih lanjut, untuk membentuk panel kontributor untuk memberikan esai yang merupakan inti dari buku ini bukanlah tugas yang cepat atau mudah dan dibantu oleh kekecewaan bahwa editor telah mengunjungi secara langsung atau dengan siapa ia memiliki beberapa kontak lainnya.



BAB 2

MASALAH KONSEPTUAL DAN TEORETIS

OLEH GRANT HARMAN KEBIJAKAN

A. Istilah Kebijakan

Istilah 'kebijakan' adalah sesuatu yang sulit dipahami dan menuntut klarifikasi. bahkan penyelidikan singkat akan mengungkapkan bahwa kata 'kebijakan' digunakan dalam banyak cara berbeda untuk merujuk pada serangkaian fenomena yang sangat beragam. kebijakan kadang-kadang digunakan dalam arti sempit untuk merujuk pada pernyataan formal tentang tindakan yang harus diikuti, sementara yang lain menggunakan kata 'kebijakan' sebagai sinonim

untuk kata seperti 'rencana' atau 'program'. banyak tulisan yang tidak membedakan dengan jelas antara 'pembuatan kebijakan' dan pembuatan keputusan.

Di sini, kami akan menggunakan kebijakan untuk merujuk pada spesifikasi implisit atau eksplisit dari tindakan sengaja yang diikuti dalam kaitan dengan masalah yang diakui atau masalah yang menjadi perhatian, dan diarahkan menuju penyelesaian beberapa set tujuan yang diinginkan. kebijakan juga dapat dianggap sebagai posisi atau sikap yang dikembangkan dalam menanggapi masalah atau masalah konflik, dan diarahkan pada tujuan tertentu. kebijakan dengan mudah dapat dibedakan dari konsep terkait. kebijakan, kemudian, difokuskan pada tindakan yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan atau secara aktif lebih daripada perilaku acak atau kebetulan. kebijakan bisa dirasakan negative atau positif, kebijakan termasuk kebijakan substantif serta kebijakan prosedural atau administrasi.

kebijakan termasuk di dalamnya bisa kebijakan tertulis atau kebijakan yang tidak tertulis, di universitas cukup banyak kebijakan prosedural mungkin tidak tertulis, namun dipahami dengan jelas dan diikuti oleh administrator utama. dalam hal konten, kebijakan publik untuk pendidikan dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. pertama, ada kebijakan yang berkaitan dengan

fungsi-fungsi penting sekolah dan institusi pendidikan tinggi. kedua, ada kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan, struktur dan tata kelola lembaga individu dan seluruh sistem pendidikan atau bagian-bagiannya. area ketiga berhubungan dengan perekrutan, pekerjaan, promosi, supervise dan renumerasi seluruh staf, tetapi secara khusus tetapi kategori yang berbeda dari professional. kategori keempat adalah kebijakan yang terkait dengan penyediaan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan. beberapa kategori kebijakan cenderung menjadi perhatian dan kepentingan yang lebih besar di tingkat sistem daripada yang lain

B. Proses kebijakan

Umumnya kebijakan baru dalam pendidikan lebih sering muncul dari variasi, penyesuaian dan penghentian atau variasi yang lama, daripada oleh pemerintah yang memasuki bidang baru upaya kebijakan.

Tahap-tahap proses kebijakan

1. memunculkan masalah dan identifikasi masalah
2. perumusan kebijakan dan kewenangan
3. implementasi
4. keputusan atau perubahan

C. Isi kebijakan

Kebijakan tidak muncul dalam ruang hampa. melainkan dikembangkan dalam konteks seperangkat nilai tertentu, tekanan dan hambatan, dan sedikit pengaturan struktural tertentu. itu juga merupakan respons terhadap masalah, kebutuhan, dan aspirasi tertentu

D. Penerapan Dan Pengembangan Kebijakan

Untuk lebih menghargai mengapa masalah kebijakan utama telah diatasi dengan cara-cara tertentu, akan sangat membantu untuk memiliki pemahaman tentang pelaku kebijakan utama yang terlibat dan tentang cara-cara khas di mana kebijakan pendidikan dikembangkan dan diterapkan.

E. Pelaku kebijakan

Para pelaku yang terlibat dengan kebijakan pendidikan mudah dibagi menjadi dua kelompok. pelaku resmi dan tidak resmi. pelaku resmi adalah individu atau entitas organisasi yang memiliki tanggung jawab berdasarkan hukum. para pelaku yang terlibat dengan kebijakan pendidikan mudah dibagi menjadi dua kelompok. pelaku resmi dan non-resmi. pelaku resmi adalah individu atau entitas organisasi yang memiliki tanggung jawab berdasarkan hukum, sedangkan pelaku

tidak resmi terutama terdiri dari kelompok kepentingan, partai politik, dan media.

Pelaku resmi terbagi ke dalam lima bagian:

1. terdiri dari para pelaku di tingkat senior pemerintahan, seperti: presiden, perdana menteri, menteri
2. kelompok kedua pelaku resmi terdiri dari menteri untuk pendidikan dan lembaga pendidikan utama dan pejabat senior mereka
3. kelompok ketiga pelaku resmi terdiri dari lembaga pendidikan lain, yang mungkin bertanggung jawab untuk tugas-tugas seperti melakukan ujian eksternal publik untuk siswa sekolah menengah akhir, pengembangan kurikulum, dan memperbaiki gaji guru.
4. kelompok keempat adalah lembaga pemerintah di luar departemen pendidikan yang berperan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan
5. pelaku resmi kelima dan terakhir adalah badan antar pemerintah.



BAB 3

SURVEY INTERNASIONAL TENTANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI BEBERA NEGARA

A. Australia

Dua karakteristik paling mencolok dari sistem pendidikan Australia berkaitan dengan campuran tanggung jawab publik dan swasta, dan dengan peran pemerintah negara bagian dan federal. pendidikan tinggi disediakan hampir seluruhnya di lembaga-lembaga publik yang beroperasi di bawah undang-undang negara bagian atau federal dan bertanggung jawab langsung kepada menteri dan / atau

kepada parlemen. secara konstitusional, Pendidikan di Australia tidak dipegang oleh pemerintah pusat, namun diserahkan pada setiap negara bagian atau teritorinya. Jadi, setiap negara bagian memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan pada konstitusi Australia, dimana pendidikan merupakan tanggungjawab negara bagian. Pada setiap negara bagian, seorang Menteri Pendidikan dengan sebuah departemen pendidikan melaksanakan pendidikan dasar dan menengah, dan adakalanya juga pendidikan prasekolah. Sehingga, masing-masing negara bagian dan wilayah daratan mempunyai otoritas sendiri dalam pelaksanaan pendidikannya. sistem pendidikan umum negara Australia saat ini cukup berkembang dengan baik menyediakan 40 persen dari total biaya semua pendidikan publik dan memikul tanggung jawab penuh untuk menyediakan dana rutin dan modal berulang untuk semua universitas dan sekolah tinggi.

Dilihat dari jenjang pendidikan formal, Australia terdiri dari 3 tahapan pendidikan, yaitu pendidikan dasar (*primary schools*), pendidikan menengah (*secondary education*, meliputi *secondary school/high schools*), dan pendidikan tinggi (*tertiary education in univervsties or TAFE [techical and further education] college*). Ada kalanya, sebelum memasuki *primary school*, peserta didik memasuki *kindergarten* atau taman kanak-

kanak. Sistem pendidikan Australia memiliki tiga sektor utama pendidikan tinggi: universitas, lembaga kejuruan, dan lembaga bahasa

Inggris. Untuk jenjang pendidikan selepas SMA dan di bawah level universitas tersedia dua jalur: pendidikan vokasi serta college. Pendidikan vokasional, berkonsentrasi pada keterampilan praktis dan pelatihan industri siap kerja. Pendidikan vokasi ini dapat ditempuh pada institusi pendidikan negeri yang didanai pemerintah Australia seperti institusi TAFE (*Technical and Further Education*), maupun pada institusi swasta. Kemudian yang kedua, ialah CAEs (*college of advanced education sector*) yang menawarkan sistem kredit yang bisa diteruskan saat melanjutkan studi ke universitas.

Sistem pendidikan Australia berstandar tertinggi dan menikmati pengakuan internasional. Sekolah adalah wajib di seluruh Australia, yang memberikan sumbangsih pada tingkat melek huruf 99 persen. Sekolah-sekolah di Australia mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri para pelajar. Lulusan universitas Australia unggul pada penelitian dan inovasi terdepan, serta pendidikan kejuruan dan teknik memajukan sektor industri yang sedang berkembang pesat. Sistem pendidikan dan pelatihan Australia tunduk pada pengkajian ulang dan kendali berkelanjutan dari pemerintah, industri dan

badan-badan profesional untuk mempertahankan dan meningkatkan standarnya yang sudah tinggi. Jaminan mutu di pendidikan tinggi Australia berdasarkan pada kemitraan kuat antara sektor pendidikan tinggi dan Pemerintah Australia, pemerintah negara bagian dan teritori. Kemitraan ini menjamin standar yang konsisten secara nasional dalam pemberian persetujuan dan akreditasi, pengawasan luar dan audit mutu independen.

B. Prancis

Sejak jaman kebudayaan Perancis berpengaruh luas di Eropa dalam abad kedelapan belas aliran-aliran pendidikan Perancis yang bermutu itu sangat berpengaruh pada falsafah bangsa Eropa. Tapi Napoleon Bonaparte yang telah mengorganisasi struktur pendidikan sistem Perancis menjadi sistem nasional lycees serta dikembangkannya grades ecoles. Selama abad kesembilan belas pengaruh luas kurikulum klasik dari lycess tersebut dan wewenang teknis daripada Grades Ecolest telah menguasai masyarakat Perancis dan membentuk

kebudayaan. Perjuangan membela sekolah berbasis komunitas merupakan dasar bagi perluasan sistem negara ke desa-desa, dan merupakan reaksi terhadap pendidikan gereja untuk kepentingan cita-cita kebudayaan Perancis, sebagaimana diajarkan dalam lycees

yang diajarkan di kota-kota. Hampir tidak pernah ada bangsa lain yang dalam pengembangan budayanya yang membiarkan sistem pendidikan yang mereka pilih atau yang sekolah-sekolahnya berpola terbuka untuk pewarisan kepada penerus kebudayaan.

Pendidikan menempati urusan pertama dalam skala prioritas nasional Perancis. Pendidikan adalah suatu hak dan sekaligus kewajiban bagi anak antara umur enam hingga 16 tahun, pemerintah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab pendidikan tingkat dasar dan menengah dengan perincian sekolah TK dan SD menjadi kewenangan distrik, SMP (*Collège*) dan SMA (*Lycées*) kewenangan pemerintah daerah dan tingkat universitas atau sekolah tinggi menjadi kewenangan provinsi. Kebijakan umum, kurikulum inti, pengadaan guru/dosen dan penggajiannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Anak-anak mendapatkan pendidikan dasar pra sekolah pada umur dua hingga enam tahun, SD antara tujuh hingga 10 tahun dan SMP (*Collège*)-SMA (*Lycées*) antara 11 hingga 18 tahun sedangkan pendidikan tinggi untuk mereka yang berusia di atas 19 tahun. Pendidikan tinggi Perancis dibagi dalam dua kategori yaitu Universitas dan Sekolah Tinggi (*Grandes Ecole*) yang memiliki ciri berbeda. Universitas berada di bawah Kementerian Pemuda, Pendidikan Nasional dan Riset sedangkan *Grandes Ecole* di bawah Kementerian Teknis sesuai bidang yang ditangani. Pendidikan di Universitas bersifat

teoritis dan umum sedangkan *Grandes Ecoles* bersifat teknis. Pendidikan di Perancis pada umumnya ditanggung oleh pemerintah, dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional (Ministere de l'Education National). Perancis menganggap bahwa “sekolah” penting bagi bangsa Perancis.

Dalam ruang lingkup pendidikan, negara Perancis merupakan negara yang menggunakan sistem sentralistik yakni pendidikan yang dipusatkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi, kementerian pendidikan (biasa disebut *Ministry of National Education*) memiliki peran urgent dalam kemajuan pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, pemerintah juga menekankan akan adanya wajib belajar 16 tahun dengan penerapan sistem sekolah gratis untuk setiap jenjang pendidikan. Salah satu sasaran utama dari pendidikan ialah penanaman rasa persatuan nasional. Untuk itu, mereka memberikan pendidikan sama dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada umumnya setiap anak pada usia enam tahun sudah memasuki dunia pendidikan melalui program *primary school (ecole primaire)*. Pendidikan formal ini biasanya didahului dengan *ecole maternelle* (pendidikan taman kanak-kanak, TK). Di TK ini seorang anak mulai umur dua tahun sudah dapat dimasukkan di taman bermain (*play group*). Selama anak berada di ruang sekolah mulai jam 09.00 hingga 17.00

mereka sepenuhnya ada di bawah asuhan dan bimbingan guru. Di antara jam belajar itu mereka (anak-anak) diberi makan siang, dan juga kadang-kadang ada acara tidur siang. Jadi, para orangtua menyerahkan anaknya ketika berangkat kerja dan menjemputnya kembali saat pulang kerja. Pada hakikatnya seluruh proses belajar ini diberikan secara gratis oleh pemerintah. Pemerintah Perancis menjamin bahwa masuk sekolah mulai TK hingga perguruan tinggi adalah gratis.

Pada akhir program sekolah dasar, siswa diklasifikasikan menurut kemampuannya bukan berdasarkan status orang tua. Semua siswa yang memenuhi syarat akan berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah. Namun dengan adanya sistem seperti mendapat kecaman dari masyarakat karena masyarakat menilai itu sama saja dengan melakukan diskriminasi sosial. Namun pemerintah Perancis mengambil kebijakan yang memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi tetapi tidak mampu dibandingkan harus meniadakan biaya sekolah. Sulitnya masyarakat untuk memperoleh kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan masyarakat memberikan kecaman terhadap diskriminasi atas ujian baccalaureat dan ujian lainnya yang menunjukkan semakin banyak rakyat yang menuntut kesempatan untuk belajar di jenjang universitas. Universitas benar-benar dalam keadaan tertekan dimana

universitas diminta untuk memperluas jumlah mahasiswa dan kontribusinya terhadap masyarakat. Direktorat pendidikan tinggi yang bekerja melalui rektor secara bertahap telah mencapai koordinasi yang lebih baik dengan fasilitas pendidikan tinggi di tiap akademi. Standar

masuk yang seragam mulai diberlakukan dan kementerian pendidikan umum mengambil alih hak eksklusif untuk memberikan ijazah dan gelar.

C. Jepang

Jepang merupakan suatu negara yang terletak di ujung timur Asia yang padat penduduk. Permukaan wilayahnya yang bergunung-gunung membuat bangsa Jepang terbebas dari pengaruh negara-negara lain. Sejauh ini system pendidikan Jepang telah dua kali mengalami perubahan drastis. Reformasi pertama, yang menyertai Restorasi Meiji (1568) menggantikan sistem konvensional dengan sistem sekolah modern. Pada masa Meiji yang bebas belajar dari bangsa Barat sesuai dengan kebutuhannya. Namun kemajuan yang pesat yang dialami oleh Jepang membuat Jepang memasuki kancah Perang Dunia II melawan Sekutu dan salah satu faktor masuknya Jepang dalam peperangan adalah adanya nilai-nilai dalam pendidikan yang memicu perang dan konflik kelas dalam sistem Pendidikan Jepang.

Akhir Perang Dunia II, Jepang harus menerima kenyataan bahwa Jepang dalam posisi kalah dan menempatkannya sebagai penjahat perang sehingga harus menerima isi Deklarasi Postdam. Deklarasi ini membuat Amerika Serikat menduduki Jepang dan mengirimkan tentara serta Misi Pendidikan Amerika Serikat ke Jepang guna melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Inilah pembaharuan kedua yang dialami Jepang dan harus menerima apapun yang di perintahkan oleh Pemerintahan Pendudukan.

Tujuan utama Pendudukan Tentara Amerika Serikat dengan Misi Pendidikan Amerika Serikat adalah untuk menghapuskan paham ultranasionalisme dan

militerisme karena menimbulkan kecenderungan yang sangat ekstrim terhadap Jepang sehingga terlibat perang, dan menciptakan pendidikan yang demokratis serta egalitarian. Oleh karena itu, Pemerintah Pendudukan merombak sistem pendidikan lama dengan sistem pendidikan baru yang berfalsafah demokratis dan manusiawi yang tercantum dalam konstitusi dan undang-undang pokok pendidikan. Selain itu, Pemerintah Pendudukan menerapkan sistem desentralisasi dalam bidang pendidikan, walaupun kurang berhasil.

Pendidikan Jepang terdiri atas sistem 6-3-3-4 dimana siswa wajib mengemban: Sekolah Dasar (*Shōgakkō*) selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (*Chūgakkō*) selama 3 tahun, Sekolah Menengah Atas (*Koutougakkou*) selama 3 tahun, dan 4 tahun atau lebih untuk jenjang Perguruan Tinggi (*Daigaku*).

Setelah masa pendudukan Amerika Serikat, sistem pendidikan Jepang dibangun atas dasar prinsip-prinsip:

1. Legalisme : Pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan meleakalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun, suku, agama, ras, dan antar golongan berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
2. Adminstrasi yang Demokratis : pendidikan di serahkan kepada dewan sekolah yang dipilih dan negara memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang masih terjangkau oleh masyarakatnya. Biaya pendidikan Jepang di usahakan untuk bisa terjangkau sesuai keuangan masyarakatnya, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ataupun kurang mampu.
3. Egalitarian : Pendidikan Jepang diberikan sama rata kepada seluruh wilayah Jepang dan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan persamaan

derajat setiap siswanya tanpa membedakan latar belakang materil, asal-usul keluarga, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, suku, agama, ras, dan antar golongan.

4. Desentralisasi : Penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada dinegara tersebut sehingga perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan sehingga dapat diikuti dengan baik.
5. System administrasi pendidikan dibangun dalam empat tingkat: pusat, prefectural (antara propinsi dan kabupaten), municipal (antara kabupaten dan kecamatan), dan sekolah. Sedangkan metode pengajaran yang digunakan di sekolah- sekolah di Jepang adalah kombinasi dari: Penjelasan dari dan tanya jawab dengan guru, diskusi antar murid, dan eksplorasi oleh murid sendiri dengan menggunakan alat pembelajaran. Sedangkan untuk menumbuhkan minat baca masyarakat bangsa jepang menggunakan pendekatan visualisasi dengan komik (menggkomikkan bahan ajar).

D. Swedia

Pada pertengahan 1940 Swedia memiliki sebuah sistem sekolah yaitu standar eropa yang cukup kuno dan tidak terlalu luas. Sekolah dasar wajib hanya mencakup enam

atau tujuh tahun sekolah. Setelah itu muncul berbagai tipe sekolah menengah pertama, yang diisi kurang dari seperempat dari lulusan sekolah dasar, hanya sekitar sepuluh persen dari semua siswa sekolah dasar yang menyelesaikan pendidikan menengah.

Salah satu sistem pendidikan di Swedia yang dapat diterapkan di Indonesia pada tingkat pendidikan menengah adalah '*yrkesutbildning*' atau '*vocational education*'. Swedia memiliki '*yrkesutbildning*' pada tingkat '*gymnasiet*' atau sekolah menengah, dan dilanjutkan ke tingkat '*yrkeshögskolan*'. Tujuan dari pendidikan ini adalah mempersiapkan tenaga kerja terampil siap kerja untuk level operasional dan administrasi.

Indonesia pun sebenarnya telah menerapkan sistem pendidikan yang sama, antara lain sekolah menengah kejuruan (SMK) dan program pendidikan diploma satu, dua, dan tiga (D1, D2, D3). Namun, pelajar Indonesia kurang menaruh minat karena minimnya gaji yang didapat oleh lulusan program pendidikan ini jika dibandingkan dengan lulusan sarjana. Pemerintah maupun lembaga penyelenggara pendidikan juga seringkali menganaktirikan '*vocational education*' dengan minimnya alokasi dana untuk program pendidikan ini. Faktor lain yang menyebabkan '*vocational education*' kurang berkembang di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat bahwa semakin banyak lulusan yang berperan

serta langsung di sektor industri akan turut pula mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, pada tingkat pendidikan tinggi, terdapat dua jalur pendidikan yang bisa ditempuh di Swedia, yaitu Universitas dan *Högskolan*. Berbeda dengan *Högskolan* yang lebih menjurus ke bidang tertentu (di Indonesia dikenal dengan Sekolah Tinggi/Institut), seperti teknik (*Tekniska Högskola*) dan ekonomi (*Handelshögskola*), *University* memiliki cakupan yang lebih luas dan melingkupi beberapa disiplin ilmu. Dalam perkembangannya, sebuah *Högskolan* bisa memperluas kompetensi ilmiahnya dan bermetamorfosis menjadi Universitas.

Namun, tidak semua *Tekniska Högskola* memiliki pola administrasi yang sama. Misalnya, LTH (*Lund Tekniska Högskola*) masih berdiri di bawah Lund Universitas. Artinya, fakultas engineerinya dijalankan di bawah LTH yang memiliki administrasi sendiri, tetapi masih berkoordinasi dengan Lund Universitas.

Setelah seorang siswa menamatkan pendidikan di Gymnasiet (setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU)), dengan mengikuti Bologna process yaitu SMU+3 (180 ETCS), maka siswa tersebut akan diberikan kesempatan untuk meneruskan pendidikan tiga tahun di bangku universitas dan kemudian bisa langsung masuk ke dunia kerja (setingkat bachelor degree/S1). Opsi kedua adalah lulus

dari pendidikan tingkatan bachelor dan menambah dua tahun masa studi untuk mendapatkan gelar master (S2). Untuk jurusan teknik, misalnya, setelah menyelesaikan lima tahun kuliah, mahasiswa akan mendapatkan gelar “*Civilingenjör*”. Gelar tersebut masih diberikan meskipun Swedia sudah mengadopsi sistem Bologna. Hal ini sepertinya hanya diaplikasikan secara internal di Swedia untuk masa transisi dan tidak berpengaruh terhadap mahasiswa asing.

Sementara itu, pendidikan S3 dijalankan dengan dua jalur penerimaan. *Vacancy PhD* adalah jalur untuk merekrut mahasiswa berdasarkan kebutuhan universitas akan penelitian yang sedang dijalankan dan *industrial PhD* adalah jalur untuk mahasiswa yang memenuhi kebutuhan pendanaan secara mandiri. Dengan sistem *employment*, seorang PhD student tidak perlu membayar biaya studi/penelitian apa pun selama menjalani pendidikan. Mereka justru akan mendapatkan standar gaji yang ditetapkan bersama dengan Labor Union. Standar gaji tersebut akan cenderung meningkat seiring dengan terselesainya masa pendidikan doktoral yang diambil. Sebagai contoh, seorang mahasiswa PhD tingkat awal yang mendapatkan 18.000 SEK akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 24.000 SEK setelah *level licentiate* dan akan menjadi 30.000 SEK setelah lulus S3 dan melanjutkan jenjang post doctoral.

Di Swedia juga terdapat *licenciate degree* yang dapat ditempuh seorang mahasiswa Master dengan menambah dua tahun masa studi. Bagi sektor industri Swedia, gelar setengah PhD ini cukup efektif untuk mempercepat laju kemajuan karier. Uniknya, kurikulum yang diadopsi oleh beberapa universitas di Swedia tidak bersifat baku. Mahasiswa dapat memilih dengan bebas mata kuliah yang diinginkan asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan universitas. Secara umum, mata kuliah yang ditawarkan terdiri atas empat level, yakni level A, B, C, dan D. Level A dan B tergolong dalam *basic level*, sedangkan C dan D tergolong *advanced level* yang dikhususkan bagi mahasiswa yang ingin mendalami mata kuliah tertentu.

Masa studi hampir semua program master internasional berdurasi dua tahun. Namun, beberapa universitas, seperti Lund University dan Dalarna University, memiliki pilihan program master satu tahun (60 credits) atau dua tahun (120 credits) untuk gelar yang sama, terutama untuk bidang *non science engineering*. Beberapa universitas di Indonesia juga melakukan kerja sama U2U (*university to university*) dengan universitas-universitas di Swedia. Misalnya, master program - *exchange* di *Karlstad University* bisa ditempuh dalam waktu satu tahun

E. Inggris

Dasar hukum dari layanan Pendidikan di Inggris dan wales yaitu Undang- Undang Pendidikan tahun 1944. Sistem pendidikan di Inggris dibagi menjadi beberapa jenjang berdasarkan umur:

1. Pendidikan pra-primer (pre-primary education), usia 3-4 tahun
2. Pendidikan primer (primary education), usia 4-11 tahun
3. Pendidikan sekunder (secondary education), usia 11-16 tahun
4. Pendidikan lanjutan (further education), usia 16-18 tahun
5. Pendidikan tinggi (higher education), usia di atas 18 tahun

Pendidikan wajib belajar dimulai sejak pendidikan primer saat anak-anak menginjak usia 5 tahun dan berakhir sampai dengan usia 16 tahun. Batas akhir usia wajib belajar ini akan berubah secara bertahap mulai tahun 2013 menjadi 18 tahun pada tahun 2015. Umumnya siswa setelah menyelesaikan pendidikan sekunder (usia 16 tahun), lalu mengambil ujian *General Certificate of Secondary Education* (GCSE), untuk kemudian melanjutkan ke pendidikan lanjutan (further education) selama 2 tahun. Umumnya setelah mendapatkan nilai GCSE siswa di Inggris mengambil kualifikasi AS (*Advanced Subsidiary*) level yang kemudian dilanjutkan dengan A- Level, yang dapat diambil di sekolah

yang sama, *sixth form college* atau *further education college*. *A-Level* biasanya dipakai sebagai syarat melanjutkan pendidikan ke universitas. Selain *A-Level* terdapat beberapa pilihan lain seperti kualifikasi *Business and Technology Education Council (BTEC)*, *International Baccalaureate (IB)*, *Cambridge Pre-U* dan sebagainya, termasuk pilihan melanjutkan ke berbagai sekolah tinggi kejuruan. Bagi yang memilih sekolah kejuruan dan ingin memasuki lapangan kerja dengan lebih cepat mereka dapat mengambil pendidikan kejuruan (vocational), sebagai contoh, pendidikan untuk mendapatkan sertifikat *National Vocational Qualification (NVQ)*.

Pemegang kualifikasi pendidikan kejuruan NVQ tetap mempunyai peluang untuk dapat meneruskan pendidikan mereka ke tingkat perguruan tinggi atau universitas, setelah memenuhi beberapa ketentuan akademis. Pendidikan tinggi (*higher education*) umumnya dimulai dengan tiga tahun pendidikan setingkat sarjana atau bachelor's degree. Kemudian, pendidikan pascasarjana dimulai dengan pendidikan tingkat master yang biasanya dapat ditempuh dalam waktu satu tahun. Tingkat pendidikan tertinggi di tahapan ini adalah pendidikan tingkat *doctor* yang setidaknya ditempuh selama tiga tahun.

Sistem pendidikan Inggris mengikuti wajib belajar dari pendidikan pra pimer,

primer, dan sekunder sampai usia 16 tahun. Kelulusan dari program ini ditandai dengan diterimanya GCSE (*General Certificate of Secondary Education*). Pendidikan di Inggris diawasi oleh departemen pendidikan dan departemen bisnis, inovasi dan keterampilan. Pada tingkat lokal, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan untuk pendidikan umum dan sekolah negeri. Di tingkat nasional, pendidikan di England diawasi pemerintah pusat yaitu oleh Departemen Pendidikan (*Department for Education - DfE*) dan Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan (*Department for Business, Innovation and Skills - BIS*). Namun untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat daerah, masing-masing pemerintah daerah diberi tanggung jawab dalam pengelolaannya.



BAB 4 KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI AMERIKA SERIKAT

A. Menurut James U. Guthrie dan Judith Bodenhausen

Negara Amerika Serikat memiliki sistem atau kebijakan pendidikan yang lebih beragam, berbeda, dinamis, dan terpusat dari negara yang lain ada di dunia. Dan sistem ini tidak banyak bergantung pada pemerintah nasional dalam membuat kebijakan pendidikan atau untuk memberikan dukungan keuangan bagi institusi pendidikan. Kemudian otoritas pemerintah yang untuk pendidikan diberikan

kepada lima puluh negara bagian dengan ketentuan dan konsekuensinya.

Amerika memiliki variasi dalam ukuran dari sekolah ruangan kecil hingga sistem perkotaan besar seperti di Kota New York yang memiliki siswa hampir satu juta. Dan beberapa sekolah umum di daerah yang lain hanya memiliki sekolah dasar, adapun yang hanya sekolah menengah, namun juga ada yang menggunakan kedua jenis ini.

Dengan adanya keragaman ini, pendidikan formal mencakup setiap segmen populasi dalam hal usia, minat dan tingkat kemampuan siswa. Sekitar 58 juta siswa terdaftar dalam lembaga pendidikan tinggi dan rendah. Anak di Amerika memulai pra-sekolah pada usia 3- 4 tahun. Kemudian, 90% dari itu akan lulus dari sekolah menengah dan lebih dari 50% melanjutkan ke lembaga pasca sekolah menengah.

Sistem pendidikan di Amerika penuh dengan paradoks seperti sekolah dimaksudkan untuk memberi manfaat orang berbakat, cacat, dan yang lainnya. Yang tua, muda, elit, dan miskin adalah target program sekolah tertentu. Sekolah diharapkan bebas dari politik namun responsif dengan klien publik serta peka terhadap kebutuhan nasional namun tunduk pada keinginan warga setempat dan diatur oleh orang awam sambil bekerja dengan para professional. Harapan itu harus dipenuhi iklim

nilai nilai nasional yang menekankan pada kesetaraan, kebebasan, dan efisiensi.

B. Evolusi Sejarah

Undang - Undang Pendidikan Amerika pertama diberlakukan oleh legislatif kolonial Massachusetts, Pengadilan Umum, pada tahun 1642. menegaskan kembali Undang-undang tentang tanggung jawab atas kemampuan anak-anak dan magang mereka untuk membaca dan menulis. Undang-undang wajib belajar ini menetapkan standar minimum, tetapi tidak menetapkan sekolah. Dari sini jelas bahwa instruksi formal diperlukan untuk menyediakan jumlah dan jenis pendidikan oleh kepemimpinan kolonial. Maka, mulai tahun 1635, sejumlah kota di Massachusetts dan koloni New England lainnya mendirikan sekolah. Pada tahun 1647, 11 dari 60 kota di New England secara sukarela mendirikan, mengelola dan mendukung sekolah-sekolah di kota.

Pada tahun 1647, Pengadilan Umum Massachusetts memberlakukan legislasi pertama yang merujuk ke sekolah. Undang-undang ini mengharuskan semua kota untuk menyediakan

seorang guru membaca dan menyediakan Sekolah Tata Bahasa Latin. Undang-undang ini disebut sebagai tindakan 'Setan Penyiksa Lama', yang bertujuan memastikan bahwa

semua orang di dalam Persemakmuran Alkitab dapat membaca dan memahami prinsip-prinsip agama dan hukum modal.

Selama masa kolonial, pengadilan umum Massachusetts memprakarsai prinsip bahwa pendidikan adalah fungsi negara dan menekankan kota sebagai unit administrasi sekolah setempat.

Pada tahun 1692, Pengadilan Umum Massachusetts memberikan wewenang kepada orang-orang yang terpilih untuk mengawasi sekolah dan memperkerjakan guru. Kemudian orang-orang terpilih mulai mendelegasikan tanggung jawab pendidikan kepada komite sekolah khusus.

Pada tahun 1789, Pengadilan Umum Massachusetts menetapkan hukum banyak praktik aktual yang telah dikembangkan di negara bagian, dengan undang-undang yang mengatur kehadiran rutin dan untuk kunjungan dan inspeksi sekolah, menempatkan tanggung jawab untuk sertifikasi guru dengan orang terpilih, menteri kota dan pendeta, memberikan pengakuan hukum kepada komite sekolah sebagai kelompok resmi yang ditugasi semata-mata dengan kontrol dan pemeliharaan sekolah-sekolah lokal, dan secara resmi mengakui kabupaten sebagai tingkat organisasi masyarakat yang terlibat dalam pendirian dan kendali sekolah.

Pada tahun 1826 di Massachusetts menetapkan kewajiban pemeliharaan komite sekolah untuk kota-kota. Undang-undang ini memberi syarat bahwa pemilihan komite tidak akan menjadi bagian dari pemerintah kota reguler, tetapi akan memiliki fungsi khusus pada tata kelola sekolah. Selama periode kolonial dan awal nasional, undang-undang di Maine, Vermont, New Hampshire, dan Connecticut mengikuti contoh yang ditetapkan oleh Massachusetts.

Di Atlantik selatan dan tengah memiliki beragam Koloni-koloni, pendidikan berkembang sangat lambat bagi pengembang daripada di New England karena penduduk Selatan sangat bergantung pada pendidikan privat dan bahasa Inggris bagi kalangan atas dibanding keluarga miskin. Meskipun demikian, pola sekolah New England pada akhirnya juga mendominasi daerah-daerah ini dengan memindahkan sejumlah besar ke tanah barat baru yang dibuka untuk pemukiman. Ini adalah cara dari tradisi New England memperluas pengaruh atas tata cara-tata cara federal untuk wilayah yang baru tersebut. Tatacara federal tahun 1785 dan 1787 mencadangkan bagian 16 dari tanah di setiap kota untuk pemeliharaan sekolah-sekolah umum di kota kecil dalam membangun setiap negara bagian baru.

Pada pertengahan abad ke-19, adanya desakan reformis sosial sehingga dibentuknya Massachusetts oleh dewan pendidikan Negara

bagian, adanya kantor pengawasan sekolah Negara, dan didirikannya bagian persiapan untuk para guru. Kemudian Badan Legislatif juga melarang kota besar itu memelihara sekolah menengah. Dan, pada tahun 1852, hukum absensi ini lulus pada sekolah pertama di negara ini. Pada tahun 1865, semua negara bagian di luar selatan telah memberlakukan undang-undang yang sama.

Pertambahan penduduk di Amerika Serikat pada awal abad 20 menyebabkan penambahan sekolah dan murid. Hal ini merupakan awal birokrasi pendidikan Amerika. Setiap dewan sekolah mewakili seribu konstituen karena sulitnya pengelolaan distrik yang besar setelah kenaikan jumlah penduduk. Hal ini juga mendorong peningkatan persiapan dan pekerjaan manajer sekolah. Adapula gerakan lain yang dapat meningkatkan persiapan dan pekerjaan manajer sekolah profesional yaitu era kemajuan dalam politik yang menghasilkan sistem baru yaitu melindungi tata kelola sekolah dari aliran utama kegiatan politik partisan.

Pengelola yang profesional didorong oleh prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang terjadi sebelum perang dunia kedua. Pernyataan dari bagian pendukung manajemen ilmiah bidang pendidikan adalah sekolah dapat dibuat sama produktifnya dengan pola manajemen sektor swasta. Hal ini dilakukan dengan mempromosikan wewenang pada manajer

sekolah profesional, dan tidak akan mengurangi biaya ataupun prestasi sekolah.

Oleh karena itu, Amerika Serikat memiliki system pendidikan desentralisasi sebelum perang dunia kedua, dengan otoritas Negara secara keseluruhannya karena didorong dengan akar sejarah yang kuat dalam mengantarkan pelayanan sekolah berdasarkan distrik-distrik setempat dan birokrasi administrator profesional yang berkembang.

C. Fitur Struktural Kontemporer Dari Pendidikan Amerika

1. Pendidikan Rendah

Di Amerika Serikat, sebesar 36 % atau sekitar 2,1 juta anak yang berusia tiga atau empat tahun mengikuti apa yang dikenal sebagai taman kanak-kanak atau pra sekolah. Kehadiran umumnya selama dua atau tiga jam sehari. Jika ibu dan ayahnya memiliki pekerjaan penuh waktu kehadirannya mungkin akan jadi lama atau sebagian kegiatan sekolah mengambil fungsi penitipan anak. Pra-sekolah ini didanai oleh pemerintah federal bagi orang yang berpenghasilan rendah tapi lebih sering, pra-sekolah bersifat pribadi dan orang tua membayar biaya.

Pada usia lima atau enam tahun anak-anak umumnya terdaftar di TK. Pada tahun 1961, ada 3,2 juta siswa TK, 94 persen dari kelompok usia. Layanan ini umumnya disediakan untuk umum dan biasanya merupakan bagian dari sekolah dasar. Sekitar 90 persen siswa sekolah dasar dan menengah terkurung di sekolah umum dan akhirnya dengan taman kanak-kanak pola dominasi sekolah Negeri Amerika ini mulai muncul. Sekolah dasar Amerika biasanya mulai dengan taman kanak-kanak dan meluas hingga setidaknya kelas enam. Beberapa sekolah dasar dapat mencakup kelas tujuh dan delapan juga, tergantung pada model konfigurasi kelas yang diadopsi oleh dewan pengawas distrik sekolah mereka.

2. Sekolah Umum

Sekolah biasanya dimulai pada jam 08:00 atau 08:30 pagi. Taman kanak-kanak biasanya hanya setengah hari. Kelas satu hingga tiga berakhir pada pukul 13:30 atau pukul 2 siang dan kelas 4 ke atas berakhir pada pukul 3 sore atau lebih. Sekolah-sekolah Amerika beroperasi lima hari seminggu. Mayoritas siswa sekolah dasar berada di kelas yang disebut mandiri. Siswa memasuki sekolah menengah pertama dimulai dari kelas tujuh. Untuk kelas tujuh, delapan dan sembilan, seorang siswa akan mengambil sekitar enam kelas sehari, pindah

dari guru ke guru dengan waktu masing-masing 50 sampai 55 menit per guru. Untuk kelas Sembilan, siswa telah didorong untuk menganggap evaluasi prestasi yang cukup serius, dan kartu laporan formal yang berisi nilai dan peringkat kinerja dikeluarkan kerumah-rumah, umumnya setiap enam minggu sepanjang tahun ajaran sembilan bulan. Bagi sekolah menengah biasanya dimulai dari pukul 8 pagi sampai 3 atau 3:30 sore. Beberapa daerah mengoperasikan sekolah menengah ini biasanya mencakup hanya kelas tujuh dan delapan dan menawarkan instruksi departemen dan dipandang sebagai transisi ke sekolah menengah. Dalam kasus ini, siswa menghadiri kelas sembilan disekolah menengah setempat, dan tidak pergi ke SMP.

Pada tahun 1981 ada 14,6 juta siswa terdaftar disekolah menengah. Sekolah menengah mencakup kelas 9 hingga 12. Dimana siswa SMP adalah pola dominan, maka sekolah menengah terdiri dari kelas 10-12. Ini sepenuhnya departemen dengan siswa biasanya memiliki periode enam atau tujuh hari. Entah dengan desain atau *de facto*, siswa umumnya akan dilacak pada saat mereka mencapai sekolah menengah. Memang sistem streaming akademik ini mungkin telah dimulai di tingkat SMP, dan para kritikus Amerika menyatakan bahwa itu dimulai, bahkan secara halus, pada tahun-tahun awal pendidikan.

Mereka yang berencana lulus perguruan tinggi selama empat tahun, umumnya akan berada di jalur akademis dengan perhatian besar. Siswa yang rencana akademik tidak diformulasikan dengan baik, atau yang tidak melakukannya dengan baik disekolah, mungkin menemukan diri mereka dalam jalur tengah yang memiliki kurikulum akademik yang disederhanakan. Bahkan perguruan tinggi negara yang tidak memiliki persyaratan masuk yang ketat. Siswa juga dapat berada di jalur ketiga dengan dominasi kursus yang berorientasi pada kejuruan. Namun, sebagian besar persiapan kejuruan di Amerika Serikat terjadi di tempat kerja, atau dalam program magang. Pendidikan kejuruan sekolah menengah Amerika umumnya belum dinilai berhasil.

3. Sekolah Non Publik

- a. Sejak tahun 1975 pendaftaran aktual di Sekolah swasta tetap stabil
- b. Pada pertengahan 1980-an, pendaftaran sekolah non-publik menyumbang 11 persen dari total pendaftaran K-12 Amerika Serikat
- c. Bagian yang paling memprihatinkan dari sistem non- publik, 65 persen, terdiri dari sekolah-sekolah yang dioperasikan oleh Gereja Katolik.

4. Pendidikan yang lebih tinggi

- a. Pada tahun 1981 Lembaga pendidikan tinggi terdiri sekitar 2.000 Perguruan Tinggi dan Universitas. Selain itu lebih dari 7,5 juta siswa terdaftar sebagai siswa penuh waktu dan tambahan 3,2 juta terdaftar paruh waktu.
- b. Pendidikan tinggi terdiri dari institusi publik dan non-publik
- c. Pada 1980, sebesar 70 persen pendaftaran di Perguruan Tinggi ada di lembaga- lembaga publik
- d. Mereka menyediakan kursus akademik selama dua tahun bagi mereka yang berkeinginan pindah ke program seni liberal empat tahun.
- e. *Community college* menawarkan program lainnya. Salah satunya adalah program kejuruan yang berorientasi khusus untuk mempekerjakan dalam perdagangan atau keterampilan
- f. Sistem Pendidikan Pasca - Sekolah Menengah di Amerika terdiri dari empat tahun perguruan tinggi seni liberal.
- g. Perguruan Tinggi seni liberal publik sering untuk persiapan guru sekolah dasar.

- h. Perguruan Tinggi ini didukung terutama oleh dana dari badan legislatif negara bagian.
- i. Pada tahun 1862, Kongres memberlakukan UU Morrill pertama. RUU ini, disponsori oleh Justin Morrill, Senator AS dari Vermont, memberikan tanah pemerintah federal kepada negara bagian untuk membangun colleges dan universitas, karenanya diberi label *Land Grant College*.
- j. Kongres kemudian menyediakan sumber daya tambahan dalam Undang-Undang Morrill kedua, tahun 1897, dan upaya ini secara substansial mendorong perluasan sistem pendidikan tinggi negara bagian Amerika.
- k. Sebagai konsekuensi dari insentif hibah tanah pemerintah federal, sekarang kasus bahwa masing-masing dari lima puluh negara bagian berisi setidaknya satu universitas besar yang menawarkan studi Pascasarjana dalam berbagai bidang akademik dan profesional.
- l. Selain sistem publik dan non-publik dari perguruan tinggi masyarakat, perguruan tinggi seni liberal dan universitas, ada sistem pelatihan yang longgar yang mempersiapkan sekolah - sekolah

pelatihan yang mempersiapkan lulusan sekolah menengah untuk berbagai upaya kerja.

D. Administrasi Pendidikan Negara Dan Struktur Kebijakan

1. Peran Pemerintah Nasional

- a. Nilai berfungsi sebagai dasar yang memelihara dan memengaruhi kebijakan publik.
- b. Undang – Undang Dasar Amerika Serikat menyebarkan kekuasaan atas tiga cabang pemerintahan antara lain : Legislatif, Eksekutif dan Yudisial. Dan tiga tingkat : Lokal, Negara Bagian dan Federal. Penyebaran tersebut dilakukan merupakan daya upaya untuk menghindari otoritas pusat yang kuat.

2. Pemerintah dan Pendidikan Negara Bagian

- a. Pendidikan adalah fungsi yang secara sadar dihilangkan dari perlindungan pemerintah federal, dan dibiarkan secara hukum di bawah kendali pemerintah negara bagian.

- b. Masing – masing dari lima puluh negara bagian memiliki jangka waktu dan cabang eksekutif di masing – masing daerah dipimpin oleh seorang gubernur terpilih. Selain sekutu setiap negara bagian memiliki sistem peradilan dengan beberapa tingkat pengadilan dan pengadilan banding yang berpuncak pada pengadilan tinggi negara bagian.
- c. Cabang eksekutif, di pimpin oleh Gubernur, berisi beberapa lembaga dengan tanggung jawab pendidikan. Kepala diantaranya adalah departemen pendidikan negara, yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah negara bagian (CSSO). CSSO ini terkadang dipilih oleh warga negara. Dan adapula CSSO ditunjuk oleh gubernur atau oleh anggota dewan pendidikan negara bagian.
- d. Departemen pendidikan negara bagian, yang dikelola oleh pendidik profesional, adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk komunikasi dengan pengawasan distrik sekolah setempat.

3. Distrik Sekolah Lokal

- a. Distrik lokal biasanya diatur dalam otoritas hukum seperti konstitusi negara dan undang-undang yang diberikan oleh

dewan sekolah. Dewan sekolah biasanya dipilih dari warga negara dalam batas geografis distrik sekolah tersebut. Sedangkan di distrik sekolah Amerika Serikat, anggota dewan sekolah biasanya ditunjuk oleh walikota atau hakim setempat.

- b. Tugas dari dewan lokal adalah bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan distrik sekolah. Biasanya dewan sekolah itu jarang memiliki cukup waktu untuk terlibat dalam pengaturan kebijakan. Dan yang terlibat dalam mengatur kebijakan sekolah adalah warga negaranya sendiri tanpa kompensasi finansial. Warga negara tersebut biasanya melakukan pertemuan dua sampai empat kali sebulan. Hasilnya adalah sebagian besar keputusan penting dibuat oleh distrik sekolah dan manajemen sekolah.
- c. Pada umumnya dewan sekolah biasanya terdiri dari lima atau tujuh anggota, dengan mengatur mengenai pemilihan dan retensi pengawas, pemilihan lokasi sekolah, penetapan gaji guru dan penetapan tarif pajak property untuk menghasilkan pendapatan lokal.

- d. Dalam setiap distrik akan memiliki pengawas sebagai chief executive officer. Di daerah besar seperti *New York City* pengawas memiliki administrator tambahan sebagai asisten. Sedangkan di distrik pedesaan, pengawas berfungsi sebagai kepala sekolah kabupaten dan bertanggung jawab untuk mengajar siswa.
- e. Dewan sekolah lokal seharusnya tidak memiliki peran pengatur kebijakan untuk sekolah non-publik atau untuk institusi pendidikan tinggi.
- f. Di setiap sekolah biasanya ada kepala sekolah yang memiliki peran sebagai kepala staf pengajaran dan penanggung jawab sekolah. Kepala sekolah dan anggota staf memiliki peran dalam bertanggung jawab untuk mengevaluasi guru, memastikan pemutusan siswa, memesan persediaan, mengawasi pemeliharaan gedung dan hubungan dengan orang tua.
- g. Pengadilan negara memiliki peran dalam menetapkan arahan untuk sekolah, dengan menafsirkan konstitusi negara.

4. Administrasi Pendidikan Tinggi

- a. Dewan Pendidikan Tinggi negara bagian atau Dewan Bupati bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan yang lebih tinggi. Dewan-dewan ini beroperasi dalam batas-batas kebijakan yang dibuat oleh badan legislatif negara bagian.
- b. Setiap kampus akan memiliki chief executive officer, presiden atau kanselor, yang akan dikenakan biaya secara lokal.

5. Badan Federal

- a. Kebijakan federal diarahkan untuk memastikan bahwa sistem sekolah Negeri tidak mengabaikan kebutuhan nasional. Seperti, hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan tenaga kerja, peningkatan produktivitas ekonomi dan memastikan kesetaraan peluang pendidikan target utama untuk kebijakan pendidikan tinggi dan rendah federal.
- b. Di tingkat pendidikan tinggi, federal pemerintah adalah pendukung utama bangsa, penelitian ilmiah dan penyedia mahasiswa, dukungan finansial.
- c. Pengadilan federal bertanggung jawab atas pembentukan substansial dari sistem ekonomi bangsa.

E. Proses Kebijakan Pendidikan Di Amerika

1. Pendidikan dan Politik

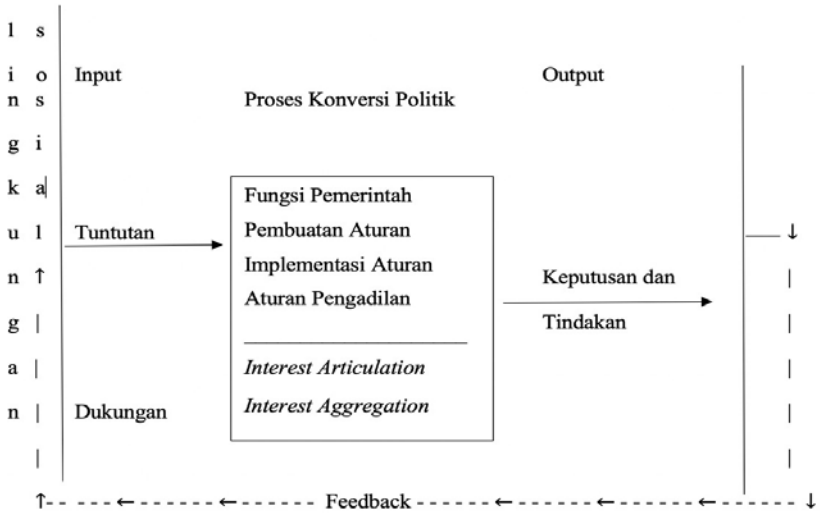
- a. Dalam proses kebijakan pendidikan Amerika para anggota masyarakat umum, anggota profesi pendidikan, bahkan banyak pejabat publik, pemerintah federal dan negara bagian semuanya terlibat dalam dunia pendidikan.
- b. Korupsi yang banyak terjadi di kota - kota Amerika pada akhir abad kesembilan belas meluas hingga ke sistem sekolah umum.
- c. Pemberian posisi mengajar oleh anggota dewan sekolah kepada pendukung kampanye pemilu sudah sangat umum. Sehingga pendidikan menderita akibat politik partisipan yang berlebihan.
- d. Mengingat kebijakan pendidikan Amerika, maka pada abad kesembilan belas, Amerika berusaha memisahkan antara pendidikan dari politik partisipan.
- e. Pemerintahan lokal menjadikan sekolah umum sebagai ruang lingkup eksklusif mereka. Dewan sekolah harus memiliki

otoritas sendiri sehingga bebas dari politik kota.

- f. Pendidikan merupakan bagian dari sistem politik, dan merupakan lembaga besar yang bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai sosial. Sehingga wajar bila pendidikan seharusnya lepas dari kegiatan politik

2. Teori Sistem

- a. Proses politik telah menggunakan penerapan teori sistem yang memberikan model yang berguna untuk menangkap banyak kerumitan pembuatan kebijakan kontemporer.
- b. Model sistem ini menggambarkan keterkaitan antara subsistem yang bertanggung jawab untuk alokasi nilai otoritatif, sistem politik, dan masyarakat yang lebih luas dan subsistem lainnya.



Gambar 1 Model dari Suatu Sistem Politik

3. Lingkungan

- a. Sekolah memproses dukungan dan permintaan dan menghasilkan output.
- b. Hasil output yang instan mengambil bentuk populasi yang diasosiasikan secara politis ini kemudian menjadi sumber permintaan dan dukungan yang berhasil
- c. Output mempengaruhi lingkungan, maka siklus umpan balik ada dalam gambar 1.

4. Input

- a. Tuntutan diklasifikasikan sebagai ekstraktif, peraturan, partisipatif, atau simbolis.
- b. Tuntutan ekstraktif dicontohkan dengan publik mengharapkan untuk pelatihan kejuruan, pemulihan kursus musik atau seni di dalamnya, atau untuk pembangunan sekolah di lingkungan yang baru.
- c. Tuntutan peraturan dicontohkan oleh keputusan yudisial untuk membongkar system sekolah ganda yang dipisahkan secara rasial atau untuk mengamanatkan agar siswa tidak diberhentikan dari sekolah tanpa siding 'proses hukum'.
- d. Tuntutan partisipatif dapat diilustrasikan oleh permintaan orang tua siswa cacat yang didukung secara hukum agar anak-anak mereka dilayani dengan lebih baik.
- e. Sekolah mengajarkan janji kesetiaan dan memberi hormat pada bendera atau menghormati orang. seperti Martin Luther King dengan memperingati hari ulang tahunnya sebagai hari libur sekolah adalah tuntutan simbolis.

5. Dukungan

- a. Item materi merupakan dukungan sebagai contoh penerimaan pajak, guru yang terlatih, bangunan sekolah dan perlengkapan sekolah.
- b. Dukungan nonmaterial seperti kepatuhan dan pertahanan untuk mengubah tuntutan menjadi output.

6. Output

- a. Output adalah umpan balik dari lingkungan politik yang lebih besar dimana mereka melayani selanjutnya untuk mempengaruhi serangkaian permintaan dan dukungan berturut-turut pada sistem kebijakan pendidik.
- b. Output diilustrasikan seperti layanan sekolah baru atau tambahan, peraturan tentang kehadiran, ketentuan untuk partisipasi tambahan.

7. Proses Konversi

- a. Tindakan politik terdiri dari kepentingan artikulasi dan kepentingan agregasi
- b. Pertama terdiri dari sarana di mana kebijakan diharapkan dapat dibawa melewati batas antara masyarakat yang

lebih besar dan sistem kebijakan pendidikan. Misalnya, jika orang tua menginginkan negara membebaskan pajak properti dengan memberikan dana yang lebih besar untuk mendukung sekolah, maka harapan ini harus disuarakan. Ini adalah proses dari kegiatan artikulasi dan dapat terjadi dalam banyak cara.

- c. Partai politik dapat memberikan harapan dalam panggung kampanyenya. Namun bila itu terjadi, hasilnya adalah untuk memperkenalkan ide ke dalam proses konversi yang berpotensi memenuhi syarat untuk transformasi menjadi kebijakan dari peraturan yang dikeluarkan.

8. Fungsi Pemerintah

- a. Tiga fungsi pemerintahan dalam sistem politik adalah membuat aturan implementasi dan aturan pengadilan. Biasanya ini dianggap sebagai bentuk perlakuan dari sebagian level pemerintahan, legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- b. Badan-badan legislatif memengaruhi implementasi aturan, misalnya, ketika melakukan dengar pendapat

pengawasan. Atau mungkin badan pembuat peraturan, dalam memilih pengawas menggunakan potensi secara substansial

untuk mempengaruhi implementasi peraturan.

- a. Di Amerika Serikat, masing-masing cabang pemerintahannya berkonsentrasi pada fungsi yang secara konstitusional ditugaskan kepadanya.
- b. Input dari masyarakat, lingkungan merupakan sumber potensial bagi proses konversi untuk berubah menjadi keluaran kebijakan.

F. Nilai Publik Dan Kebijakan Sekolah Publik

Budaya Amerika mengandung tiga kekuatan yang dipegang teguh yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan publik: kesetaraan, efisiensi dan kebebasan. Tiga nilai ini dianggap 'baik', 'tepat' dan 'benar'. Kepercayaan pada mereka memiliki akar sejarah yang tertanam kuat dalam warisan bersama Amerika. Keyakinan ini meresap ke dalam ideologi yang diumumkan oleh partai-partai politik, legenda, sekolah, dan lembaga sosial lainnya.

Terlepas dari pengabdian publik yang luas terhadap nilai-nilai ini sebagai tujuan abstrak, pemenuhan akhir dari setiap nilai pada dasarnya mustahil. Pada intinya tiga kondisi yang diinginkan tidak konsisten dan antitesis. Pengejaran eksklusif terhadap satu melanggar atau menghilangkan yang lain. Akibatnya, upaya untuk menata kembali masyarakat sehingga memaksimalkan salah satu dari tiga nilai dibatasi oleh kekuatan yang dirancang untuk mempertahankan status quo. Keseimbangan dinamis di antara ketiga nilai ini terus bergeser, dengan keseimbangan pada titik tertentu tetap sebagai konsekuensi dari serangkaian kompromi politik dan ekonomi yang rumit. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah yang tertinggi dari tiga nilai.

Di antara para pemimpin Amerika Serikat abad ke-18, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara setara dalam urusan pemerintahan dan karenanya penting untuk memastikan kebebasan.

Baru pada abad ke-19 pendidikan itu mulai menganggap penting dalam hal ekonomi. Meningkatnya tuntutan teknologi industri mengharuskan tenaga kerja terdidik, sekolah diambil sebagai kontribusi penting bagi efisiensi ekonomi.

Pada abad ke-20, pengembangan teknologi yang semakin intensif saling

ketergantungan ekonomi membuat persiapan formal menjadi sine qua non (syarat mutlak) untuk kesuksesan ekonomi dan sosial individu. Akibatnya, pendidikan dianggap penting baru dari sudut pandang perannya dalam memaksimalkan kesetaraan.

1. Kebijakan Pendidikan AS Pasca Perang

Dimulai dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1954 *Brown v. Dewan Pendidikan*, dan berlanjut dengan peningkatan program pendidikan pemerintah federal tahun 1960-an dan upaya reformasi keuangan sekolah pada tahun 1970-an, sebagian besar kebijakan pendidikan abad ke-20 telah diarahkan untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar. Akibatnya, nilai-nilai kebijakan sekolah berkonsentrasi pada kesetaraan. Maka dilakukannya upaya-upaya setelah perang Dunia Kedua untuk mencapai efisiensi dan kebebasan yang lebih besar.

2. Persamaan

Reformasi kebijakan pendidikan pasca-Perang Dunia Kedua yang berfokus pada kesetaraan telah mengikuti tiga dimensi khusus, yaitu :

- Upaya untuk mendapatkan akses klien yang lebih setara ke layanan pendidikan.
- Distribusi sumber daya keuangan negara yang lebih merata.

- Akses karyawan yang lebih setara terhadap pengambilan keputusan.

a. Akses ke Layanan

Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1954 dalam *Brown v. Board of Education* adalah salah satu yang paling signifikan dalam sejarah bangsa. Kasus ini tidak hanya memiliki konsekuensi khusus untuk tidak mengesahkan legitimasi konstitusional sebelumnya dari sistem sekolah yang dipisahkan oleh ras, tetapi juga melepaskan gerakan nasional yang substansial untuk memperbaiki keluhan hak-hak sipil. Sistem sekolah di Amerika Selatan sebelumnya telah dipisahkan secara rasial oleh undang-undang.

b. Siswa Disabilitas (Cacat)

Orang-orang disabilitas tidak memiliki akses yang sama ke layanan pendidikan yang disediakan untuk umum. Pada awal tahun 1970-an, salah satu keputusan yudisial yaitu ; “Memerintahkan badan legislatif negara bagian untuk memberikan akses sekolah yang setara bagi orang-orang disabilitas”. Putusan pengadilan ini memfasilitasi diberlakukannya Undang- Undang Pendidikan untuk Semua penyandang

disabilitas, ini terjadi pada Kongres 1975 (UU Publik 94-142).

c. Siswa Bilingual

Tahun 1960-an, Amerika Serikat mulai mengalami peningkatan besar para migrasi. Awalnya, orang-orang pergi ke Puerto Ricoan dan Cubabut kemudian mendominasi populasi dari Meksiko dan Amerika Tengah, maka dari itu semakin banyak anak usia sekolah yang tidak dapat berbicara bahasa Inggris.

Pada tahun 1980-an, tercatat 10% dari Siswa California non-Inggris, mereka sangat terbatas dalam berbahasa inggris. Kasus-kasus pengadilan, khususnya *Lau v. Nichols*, pro-mengklaim hak hukum siswa tersebut yaitu dapat menerima instruksi yang efektif dan menerima akses yang sama ke layanan pendidikan. Pertanyaan politiknya adalah sejauh mana pendidikan bilingual harus membantu dan mempertahankan budaya siswa?. Ini yang menjadi masalah kebijakan pendidikan yang kontroversial untuk abad ke-20, yang masalahnya diperburuk oleh kelangkaan sumber daya publik pada tahun 1980-an.

3. Pendidikan Para Migrasi

Untuk membantu distrik sekolah setempat lebih baik dalam mendidik siswa, baik pemerintah federal dan sejumlah Negara telah memberlakukan program bantuan kategori keuangan. Karena kenyataannya pertanian Amerika tergantung pada tingkat substansial pada tenaga kerja individu dan keluarga yang bergerak dalam keeping dengan pola tanaman musiman.

4. Distribusi Sumber Daya

Untuk mendistribusikan sumber daya keuangan dalam pendidikan dilakukan dengan tiga upaya. Yaitu, yang pertama ditujukan untuk pendidikan rendah, yang kedua untuk pendidikan sedang dan yang terakhir untuk pendidikan tinggi. Upaya ke-3 gerakan keuangan sekolah yang telah menjadi strategi reformasi berorientasi pada peradilan.

5. Kompensasi Pendidikan

Pendidikan dasar dan menengah diberlakukan pada tahun 1965, adapun alokasi kongres tahunan melebihi tiga miliar. Dana tersebut dialokasikan ke negara bagian, ke distrik sekolah setempat, berdasarkan jumlah anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Dana digunakan untuk memberikan instruksi intensif, umumnya di kelas dasar.

6. Bantuan Siswa Pasca-Menengah

Amerika Serikat bergantung pada tiga program yang dibentuk pemerintah federal dengan cara finansial, salah satunya UU penyesuaian Prajurit. Akan tetapi, program ini pada dasarnya bukan ukuran kesempatan yang sama dan sampai taraf tertentu, tersedia bagi para veteran berdasarkan tahun-tahun dinas militer mereka belum tentu memenuhi kebutuhan keuangan mereka dua program lainnya yaitu GSLP (The Guaranteed Student Loan Program) dan BEOG (Basic Educational Opportunity Grants). BEOG dirancang untuk membantu siswa sesuai dengan tingkat pendapatan orang tua.

7. Reformasi Keuangan Sekolah

Periode dari tahun 1970-1980 merupakan saksi bagi pergerakan reformasi keuangan terbesar di setiap periode dalam sejarah Amerika. walaupun hasilnya tidak mencakup seluruh Negara bagian. Pada suatu lembaga pendidikan yang lebih tinggi didanai secara langsung oleh Negara.

8. Akses Kebijakan

Muncul gerakan campur tangan yang dilakukan oleh para guru dengan cara tawar menawar langsung dengan dewan sekolah, gerakan ini dimulai pada tahun 1955 di New York dan berkembang hingga sekarang. Pada

tahun 1980 para guru di AS bersatu dengan masyarakat, Gerakan ini muncul karena pertumbuhan guru yang rendah pasca perang dunia ke II.

9. Efisiensi

- a. Upaya membuat sekolah lebih produktif dengan cara mengasumsikan bahwa adopsi prinsip-prinsip manajemen ilmiah akan mempengaruhi mental legitimasi, namun prosedur teknokratis tidak mampu meningkatkan produktivitas pendidikan, mengembangkan dua tahap tambahan, pengujian dan pengendalian fiskal.
- b. Peluncuran sputnik pada tahun 1957 ke luar angkasa oleh Uni Soviet, Amerika sangat responsif setahun kemudian yaitu tahun 1959, Amerika Serikat meluncurkan kapsul ruang angkasa pertama yang sukses hal ini menunjukkan bahwa AS menjadi negara pertama yang mendaratkan astronot di bulan.
- c. Dengan latar belakang ketidakpuasan publik yang tidak terfokus pada produktivitas sekolah, muncul "Laporan Coleman" tahun 1966 dengan temuannya yang banyak disalahtafsirkan, bermaksud untuk mengatakan bahwa

sekolah tampaknya memiliki pengaruh yang kecil terhadap prestasi

10. Teknokrasi

- a. Teknokrasi jika diterapkan secara tepat pada sekolah dapat memberikan kesempatan kepada siswa agar kinerja siswa lebih baik dan biaya pengeluaran siswa lebih rendah.
- b. Upaya menerapkan strategi teknokrasi untuk pendidikan publik dilakukan pada akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an.
- c. Teknokrasi tidak hanya bisa diterapkan dalam sistem pendidikan saja, bisa juga diterapkan dalam sistem pemerintahan.
- d. Negara - negara akan melatih para guru dengan teknik - teknik pengajaran yang paling efektif untuk siswa, setelah mendapatkan teknik-teknik pengejaran ini mereka akan dilisensikan untuk mengajar dan mendapatkan sertifikasi.

11. Pengujian

- a. Semua publisitas, uang, dan usaha gerakan akuntabilitas teknokratis pada awal 1970- an tidak banyak mendapatkan hasil, penilaian

- masyarakat pun mencerminkan kegagalan.
- b. Tes tidak cukup untuk menangkap berbagai tujuan sekolah dan penggunaan ujian berlebihan akan merusak tujuan Pendidikan.
 - c. Masyarakat umumnya tetap percaya bahwa ujian adalah ukuran yang akurat dalam hasil sekolah.

12. Ketentuan Fiskal

- a. Pembagian wilayah sekolah telah berjalan selama lebih dari satu abad. Dalam perencanaan keuangan sekolah, dewan sekolah setempatizinkan untuk mempertahankan keputusan pajak dalam batas tertinggi saja. Tahun 1972, *Serrano v. priest*, memberikan batas dalam pembagian wilayah sekolah. Akibatnya ada sekolah yang mengalami penurunan jumlah pendaftar. Maka anggaran operasional yang didapat juga mengalami penurunan.
- b. Pengendalian fiskal (pendapatan) mencapai keberhasilan. Sebuah survey Rand Corporation mengungkap total pengeluaran pemerintah sebagai fungsi GNP pada tahun 1929-1975. Pengeluaran pemerintah untuk sekolah mencapai 35%

dari total barang dan jasa yang diproduksi Amerika Serikat. Tahun 1972-1979, persentase turun menjadi 32,6%. Pada tahun 1956 pengeluaran untuk sekolah yaitu 30% namun pada tahun 1975 turun menjadi 27%. Bahkan pada tahun 1979 lebih rendah lagi.

- c. Untuk mencapai efisiensi sekolah yang lebih besar dengan membatasi input dolar, bahkan jarang sekolah yang mendapat reformasi pemerataan. Untuk menjalankan reformasi sekolah didapat dari sumber daya tambahan dan pemungutan pajak dan lain- lain. Apabila sumber daya tersebut di kelola kembali hanya akan menimbulkan konflik politik.

13. Kebebasan

Sistem pendidikan di Amerika telah ditandai oleh keragaman substansial. Pada saat itu Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menegaskan hak orang tua untuk memilih diantara sekolah negeri dan swasta. Upaya yang dilakukan secara konsisten bahwa meskipun sekolah itu wajib tetapi sekolah itu harus tetap bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan melayani.

14. Privatisasi

Pada pertengahan tahun 1950 keputusan degradasi sekolah Mahkamah Agung memicu banyak reaksi. Sekolah-sekolah dipisahkan secara rasial upaya kalangan putih harus dihindari, dan mengambil berbagai bentuk yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketidakpatuhan terhadap hukum, dalih hukum, penundaan, dan pelarian. Pada abad ke 20 strategi terakhir ini mengalami pelonjakan terbesar dalam pendaftaran sekolah non-publik meningkat 14% dari total populasi sekolah.

Pertumbuhan ini dihasilkan dari pembetukan ratusan 'musuh putih'. Pangeran Edwards Country, berusaha keras untuk membantu sekolah-sekolah yang terpisah dengan menempelkan sekolah-sekolah publiknya. Mississippi mencabut undang-undang kehadiran sekolah dan undang-undang wajib untuk mengatur pembayar uang sekolah negara untuk siswa yang bersekolah di swasta terpisah. Upaya ini akhirnya ditemukan ilegal. Akademi-akademi kecilpun mulai tutup. Karena ini proporsi sekolah mulai turun, pada tahun 1975 siswa yang terdaftar di sekolah-sekolah non-publik dibagi menjadi 2 atau menjadi 7%. Karena banyaknya sekolah yang terpisah ketakutan kulit putih terhadap sekolah campuran rasial setidaknya mulai mereda sebagian.

Pada tahun 1960 pendaftaran sekolah non-publik mulai naik sekitar 10-11%. Meningkatnya popularitas publik ini mendorong pendukung legislatif seperti di negara New York dan Pennsylvania, memberlakukan ketentuan bantuan negara yang menguntungkan sekolah-sekolah untuk persediaan dan untuk menutupi biaya yang di amanatkan oleh pemerintah. Apapun popularitas politis atau kejujuran moral dari ketentuan tersebut, mereka secara sistematis telah ditemukan secara konstitusional tidak dapat diterima.

Pejabat pendidikan administrasi Johnson membentuk kompromi antara Asosiasi Pendidikan Nasional untuk mengakhiri Konferensi Kesejahteraan Katolik rasional. Kegagalan mendapatkan persetujuan yudisial untuk bantuan negara besar dalam rencana sekolah non-publik, ESEA mencoba strategi yang lebih dramatis berupa pembayaran UKT. Upaya ini dimulai pada tahun 1977.

Jalan lain dalam pelaksanaan privatisasi untuk mendapatkan dukungan publik yaitu paket voucher. Bantuan pemerintah kepada siswa dalam memilih sekolah pilihan mereka, diperkenalkannya pendidikan tingkat tinggi dengan munculnya apa yang disebut "G.I. Bil" setelah Perang Dunia Kedua

Pada tahun 1955, Milton Friedman, ekonom pemenang Hadiah Nobel,

menganjurkan strategi serupa untuk mengembalikan efisiensi dan responsif ke pendidikan rendah. Gagasan Friedman mulai mendapat perhatian lebih besar selama permulaan gerakan efisiensi pada 1960- an.

15. Responsif

Empat gelombang reformasi terjadi antara tahun 1955 dan 1980:

- a. gerakan yang disebut 'kontrol masyarakat'
- b. upaya untuk mendirikan sekolah alternatif
- c. desentralisasi administrasi, dan
- d. situs sekolah dewan penasehat dan orang tua dewan.

16. Kontrol Komunitas

- a. Pada awal 1970-an, *Ford Foundation* mensponsori sebuah pembelajaran tentang sekolah-sekolah di Kota *New York*.
- b. Untuk mendapatkan langkah yang tepat dalam memisahkan wilayah sekolah kota *New York* menjadi sekolah yang lebih kecil, yang bisa dikelola dengan baik.
- c. Badan Eksekutif *New York* memberlakukan peraturan yang

membagi sekolah- sekolah kota menjadi 31 bagian dasar dengan pemimpinnya tunduk pada otoritas dewan sekolah pusat kota.

- d. Hal ini disebut-sebut sebagai cara untuk mengembalikan sekolah ke analisis politik 'rakyat' yang menyatakan bahwa dewan lokal yang baru terpilih diusulkan oleh warga yang didukung oleh serikat guru.

17. Sekolah Alternatif

- a. Sekolah Alternatif adalah konsep yang memiliki pembahasan yang cukup luas karena melibatkan sejumlah gagasan sekolah, beberapa di antara gagasan tersebut, ada yang saling bertentangan.
- b. Pada tahun 1960-an, beberapa penulis terkenal menulis kritik pedas dan menyatakan bahwa sekolah negeri secara seragam, represif, melumpuhkan kreativitas siswa dan staf, serta dikelola dengan cara yang sederhana, karena itu diusulkan reformasi.
- c. Hal ini menyebabkan orang tua memindahkan anak-anak mereka dari sekolah umum menuju sekolah alternatif swasta.

- d. Sekolah dasar Inggris sering dikutip sebagai model untuk tahun-tahun awal siswa, dimana pengalaman belajar yang relatif tidak terstruktur akan lebih mudah membantu dalam transisi.

18. Desentralisasi Administratif

- a. Pada tahun 1960-an dan 1970-an kawasan sekolah di kota besar mengalami gelombang desentralisasi (penyerahan kewenangan).
- b. Dengan adanya pembagian kewenangan akan memungkinkan sekolah menjadi cepat menanggapi atau responsif terhadap peserta didik sebagai klien dan pendidik sebagai karyawan.
- c. Pola tipikal adalah membagi kabupaten menjadi beberapa petugas administrasi yang secara tertulis bertanggung jawab atas semua sekolah di kecamatan.
- d. Setiap wilayah yang berbeda tingkat kebijaksanaan pengambilan keputusan yang diizinkan untuk setiap unit juga bervariasi.
- e. Perencanaan kurikulum dan penekanan pengajaran dapat dibuat bervariasi sesuai dengan selera administrator kecamatan.

- f. Hanya di New York City pembagian kewenangan disertai dengan reformasi politik, yaitu pemilihan dewan sekolah kecamatan. Di kota-kota lain, dewan sekolah pusat terus menjadi badan pembuat kebijakan untuk seluruh wilayah.

G. Manajemen Lokasi Sekolah

Rencana mendorong upaya keempat untuk menanamkan sekolah dengan partisipasi warga yang lebih besar dimasukan untuk mendapatkan ukuan kontrol awam yang lebih besar dan memberikan lebih banyak 'akuntabilitas' dengan menggunakan sekolah, daripada distrik sebagai unit pengambilan keputusan dasar untuk personel dan kurikulum. Alokasi anggaran setiap sekolah ditentukan oleh seperangkat aturan yang seragam, termasuk kriteria seperti jumlah, tingkat kelaas, dan catatan prestasi siswa yang ditugaskan disekolah. Dewan penasehat orang tua akan mengeluarkan laporan evaluasi tahunan termasuk rencana untuk tahun berikutnya.

Bagian-bagian dari gagasan itu juga diterima dengan baik oleh otoritas federal, yang mulai memasukan persyaratan dewan penasihat orang tua untuk sekolah yang menerima dana bantuan kategoris dibawah program-program seperti ESEA, gelar I,

Undang-Undang Bantuan Sekolah Darurat (ESAA) dan dana kategorikal dwibahasa.

H. Kesimpulan

Hampir setiap reformasi telah menunjukkan bahwa mengejar satu nilai secara terisolasi sebenarnya mustahil. Koalisi reformasi keuangan sekolah yang berhasil hingga 1980 paling sering dibentuk oleh para pendukung kesetaraan dan efisiensi. Oleh karena itu, di negara bagian demi negara, redistribusi pengeluaran dan perpajakan telah disertai dengan reformasi produktivitas seperti pelatihan pencapaian di seluruh negara bagian, batas pengeluaran, prosedur pelatihan guru yang ditentukan oleh negara, guru yang diwajibkan negara, dan persyaratan pelaporan tambahan. Hasil di hampir setiap contoh telah mengurangi kebijakan pengambilan keputusan untuk otoritas sekolah setempat. Apakah konsekuensi ini akan, pada waktunya, menumbuhkan tekanan balik untuk reformasi pada dimensi kebebasan masih harus dilihat.



BAB 5 KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI GERMAN BARAT

A. Menurut W. Schwark and A. Wolf

Setelah Perang Dunia Kedua, perhatian pendidikan utama dari tiga kekuatan pendudukan Barat adalah untuk membawa, melalui pendidikan ulang, transisi ideologis dari Sosialisme Nasional ke demokrasi di masyarakat Jerman.

Dengan berdirinya Republik Federal (*Bundesrepublik*) pada tahun 1949, fase awal pemulihan dan rekonstruksi ini digantikan oleh

periode koordinasi di sektor pendidikan. Pada tahun 1949 'Konferensi Permanen Menteri Pendidikan' (*ständige Konferenz der Kultusminister*) di daerah (*Bundeslander*) dibentuk. Pada tahun 1955 ia menyetujui kode prosedur standar yang berlaku untuk pertanyaan administrasi dan organisasi sekolah. Pada tahun 1955 Komite Genmen membandingkan iptek di Republik Federal dengan negara lainnya ternyata masih tertinggal.

Ilmu Pengetahuan dan Penelitian (*wissenschaftsrat*), dibentuk pada tahun 1957, dibagi menjadi kursus empat tahun di sekolah dasar (*Grundschule*) dan kursus lima tahun di sekolah menengah (*Bauptschule*).

Di sekolah, kursus delapan tahun sekolah dasar (*volksschule*) yang ada, pada tahun 1964, dibagi menjadi kursus empat tahun di sekolah dasar (*Grundschule*) dan kursus lima tahun di sekolah menengah (*Bauptschule*).

Sejak tahun enam puluhan beberapa otoritas hukum dalam hal kebijakan pendidikan di Republik Federal telah mengalami pergeseran yaitu dari daerah ke pemerintah nasional. Pada tahun 1965 dibentuk pendidikan di Jerman yang dirancang dengan mengambil keputusan politik dan persyaratan akademik yang lebih lengkap. Pada tahun 1970, satu tahun setelah koalisi Sosialis-

Liberal berkuasa yang meloloskan Rencana struktural untuk Sistem pendidikan, dimulailah fase reformasi pendidikan mendasar. Tujuan utamanya adalah untuk membuat kesetaraan dalam kesempatan yang efektif di bidang pendidikan, dan merekomendasikan sekolah komprehensif (*Gesamtschule*)

Pada tahun 1976 komprehensif tentang pendidikan serta rancangan undang-undang yang menstandarkan struktur pendidikan tinggi. Pada tahun 1973, 'Komisi Regional Nasional' (*Dan-Länder*) Komisi menyiapkan cetak biru keseluruhan untuk pendidikan. Pada tahun 1971, "Legislasi untuk Dukungan Wajib dan Pendidikan Selanjutnya" (*Bundesausbildungsförderungsgesetz BAFÖG*) memberikan dukungan negara bagi mereka yang memulai kursus pendidikan dan pelatihan.

B. Sekolah Dasar

Pada tahun 1920 di bawah Republik Weimar, sekolah dasar empat tahun menjadi entitas yang berbeda dalam kerangka sekolah dasar. Selama periode antara 1933 dan 1945, Ilmuwan nasional mendistorsi gagasan 'pendidikan populer' sesuai dengan ideologi mereka. Setelah Perang Dunia Kedua, masing-masing pemerintah daerah menghidupkan kembali konsep sekolah dasar Republik Weimar. 'Heimatkundlicher Gesamtunterricht'

menjadi prinsip panduan sekolah dasar sebagai instruksi umum dalam pengetahuan lokal.

Ketika sekolah dasar dipisahkan dari sekolah menengah pada tahun 1964 ada sistem yang perlu dirubah, yaitu yang awalnya sistem terpusat pengetahuan lokal diganti menjadi sistem yang berorientasi pada subjek.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep dasar sekolah :

1. tren menuju spesialisasi yang lebih besar
2. kesetaraan kesempatan pendidikan yang lebih besar
3. percepatan proses pembelajaran yang dikombinasikan dengan 'pengajaran pra-sekolah' yang lebih spesifik
4. gerakan menuju lebih banyak kebebasan dan ruang lingkup bagi anak dalam materi pelajaran aktual dan metode.

Sekolah dasar pada saat ini mengalami perubahan kurikulum dari sekolah dasar pada zaman dulu. Sekolah dasar sekarang lebih banyak menggunakan konsep pendekatan matematika daripada operasi dasar matematika. Konsep mata pelajaran pun diubah dari yang tadinya 'Studi Terpadu' menjadi '*keimatkunde*'.

Konsep bakat yang kaku kini telah digantikan oleh konsep yang lebih dinamis.

Kini sekolah dasar lebih diharapkan untuk mempraktikkan kurikulum kreatif dan sosial yang juga dilengkapi dengan masalah topikal. Tahun pertama di sekolah menengah pun diharapkan masih memakai bentuk sekolah dasar, alasannya adalah transisi masa dari sekolah dasar ke sekolah menengah dan transisi tata bahasa dan juga untuk mengintegrasikan peningkatan jumlah anak-anak dari keluarga pekerja asing. Jika masih banyak tanggung jawab yang harus dihadapi oleh sekolah dasar maka hal ini bisa mengancam membebani sekolah dasar. Pendidik hari ini mengharapkan lebih banyak waktu dan lebih banyak 'ruang siku' untuk diberikan kepada kurikulum 'khusus anak-anak'.

C. Sekolah Menengah

1. Pengembangan

- a. Dari masa Republik Weimar hingga 1964 sistem sekolah di Jerman dibagi menjadi beberapa sektor menurut jenis sekolahnya.
- b. Sebagian besar murid tetap berada di sekolah dasar delapan tahun setelah menyelesaikan kursus sekolah dasar empat tahun, kemudian memasuki dunia kerja orang dewasa.

- c. Hanya beberapa yang dipindahkan setelah tahun keempat dari sekolah dasar ke sekolah menengah atau tata bahasa, yang keduanya membayar biaya dan karenanya tidak dapat diakses oleh sebagian besar kelas di masyarakat.
- d. Jenis sekolah
 - Anak-anak kelas pekerja menghadiri sekolah dasar
 - Anak-anak kelas menengah (Dari pekerja bergaji dan pejabat rendah) menghadiri sekolah menengah
 - Anak-anak kelas atas (pegawai negeri dan akademisi yang lebih tinggi) menghadiri sekolah tata bahasa.
- e. Perpanjangan sekolah dasar delapan tahun, dengan sub-divisi menjadi sekolah dasar empat tahun dan lima tahun biasa sekolah menengah (Hauptschule).
- f. Dari tahun 1965 hingga 1975 Dewan Jerman untuk Pendidikan mematangkan rencananya untuk mengonversi skala vertikal sistem sekolah ke dalam yang diatur secara horizontal.
- g. Rencana `Struktur Jerman Dewan untuk Pendidikan` (*Sreukturplan des Deutschen Bildungsrats*) (1970) dirancang setelah pola Amerika dan Inggris, disediakan pengaturan

- Area utama (sekolah dasar)
- Tahap Pertama I (tahun sekolah kelima hingga kesepuluh)
Murid, orang tua dan guru dapat dibantu dalam akhirnya memilih jenis sekolah yang sesuai, dan mobilitas antara sekolah menengah biasa, menengah dan sekolah tata bahasa
- Tahap kedua II (tahun sekolah ke sebelas hingga ketiga belas).
Memasukan bentuk atas sekolah tata bahasa dan sekolah pelatihan kejuruan (berufsbildenden Schule), mengakhiri dengan ujian cuti sekolah khusus
- Mereka yang dikendalikan oleh SPD (Sosial Demokrat) lebih menekankan pada integrasi seperti yang dicontohkan oleh sekolah komprehensif, sementara CDO (Kristen Demokrat) mengendalikan daerah cenderung mendukung sistem tradisional sekolah yang diklasifikasikan secara terpisah.

2. Kategori dan Tren

Terlepas dari upaya yang ada dalam "Rencana Struktural" untuk mendorong integrasi, sektor pendidikan menengah di Republik Federal yang awalnya berkembang

menjadi satu kesatuan yang utuh sekarang berubah menjadi konglomerasi dari berbagai jenis sekolah. Keputusan mengenai jenis sekolah mana yang cocok tersebut harus dibuat selama 4 tahun, dan keputusannya tidak dapat dibatalkan. Bukan tanpa alasan, tetapi pada kenyataannya sejak tahun enam puluhan, jumlah sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap, banyak yang maju dengan pesat contohnya sekolah menengah dan tata bahasa. Hal ini disebabkan karena transfer kembali kesekolah menengah cukup mudah dilakukan dibandingkan dengan ke sekolah lanjutan.

Hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa sekolah yang terdiri dari sekolah menengah biasa dan sekolah khusus (hingga kelas 9), sekolah menengah dan sekolah tata bahasa (hingga kelas 10). Tahap awal yang dilakukan adalah tahap aklimatisasi ke sekolah kemudian sekolah menyediakan pendidikan yang berorientasi kejuruan, dan studi yang lebih tinggi 80% Murid didaerah kota mereka lebih memilih mendaftarkan diri kesekolah yang lebih maju, sehingga SMK itu semacam "tempat pembuangan". Karena itu beberapa daerah sering bereksperimen dengan skema model dimana lebih menekankan pada pelatihan yang berorientasi pada pekerjaan. Sedangkan disekolah berkebutuhan khusus, yang diklarifikasi menurut jenis kecacatan yang terlibat. Namun biasanya, sebagian besar anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka

mengakhiri sekolah pada tahun ke sembilan. Saat ini sedang dilakukan pengurangan jumlah sekolah berkebutuhan khusus, dan meningkatkan integrasi ke sekolah formal.

Sekolah tata bahasa, menyediakan pendidikan menyeluruh, mengarah dalam tiga tahun dan memberikan 'sertifikat lebih tinggi' (Abitur). Saat ini, 'Sekolah Menengah Atas' ditandai dengan berbagai fasilitas khusus yang ditawarkannya (kursus dasar dan kemahiran sesuai kebutuhan) sedang dicoba. Namun, tampaknya minat dan bakat siswa sangat tergantung oleh dorongan yang lebih kuat terhadap prestasi akademik.

Sekolah-sekolah yang menyediakan pelatihan kejuruan diselenggarakan secara luas dan bervariasi, sifatnya dari satu daerah ke daerah lain. Pada dasarnya orang dapat membedakan jenis-jenis sekolah, seperti: Sekolah kejuruan paruh waktu, Sekolah kejuruan penuh dan sekolah lanjutan, sekolah teknik atau perdagangan yang maju dan sangat maju. Setiap orang yang sudah menyelesaikan masa sekolah sembilan tahun, mereka menerima pelatihan kejuruan dasar. Pelatihan disini diarahkan pada persiapan untuk bekerja yang akan berlangsung pada suatu hari, dengan syarat telah menyelesaikan studi mereka.

Sekolah kejuruan penuh waktu menjalankan kursus yang berlangsung dari

satu hingga periode pelatihan wajib. Sekolah lanjutan menawarkan pengajaran teoretis khusus yang dapat berjalan paralel atau mengikuti pelatihan kejuruan. Menjadi perusahaan penuh waktu kursus satu hingga tiga tahun mereka dapat mengarah ke 'Sertifikat Menengah Teknis' (*fachschulreife*) yang sesuai dengan 'Sertifikat Menengah' (*moss reife*). Sekolah teknik (*fachschulreife*), baik penuh atau paruh waktu, menjalankan kursus profesional independen mereka sendiri, dan memberikan instruksi yang lebih lengkap dan dikombinasikan dengan pelatihan yang lebih umum.

Tabel 1
Distribusi Murid Sekolah Menengah berdasarkan jenis Sekolah

1960		1980
a. 66%	← <i>die Eauptschule</i> (sekolah modern menengah)	→ a. 45%
b. 14%	← <i>die Realschule</i> (sekolah menengah)	→ b. 25%
c. 20%	← <i>das Gymnasium</i> (sekolah tata bahasa)	→ c. 30%

D. Wilayah Tertier Dan Lainnya Pada Pendidikan Tinggi

1. Sekolah/ Perguruan Tinggi dan Universitas

Pendirian universitas pada abad pertengahan sebagian besar bersandar pada paham seorang filsuf praktik pendidikan yaitu Wilhelm von Humboldt. Dalam prinsipnya mencakup kebebasan akademik untuk guru dan siswa universitas, pengajaran dan penelitian terkoordinasi, dan juga hak seorang ketua universitas untuk menggunakan otonomi administratif dalam masalah akademik. Namun pada periode Sosialis Nasional, prinsipnya dirusak. Setelah itu dihidupkan kembali namun tujuannya tidak sesuai dengan masyarakat. Akibatnya universitas berubah sistemnya menjadi semacam pelatihan untuk komunitas-komunitas. Lalu sekolah-sekolah tinggi bergabung untuk membentuk universitas.

Pada periode Sosialis Nasional, jumlah siswa menurun. Namun semakin berjalannya waktu, jumlah perguruan tinggi dan universitas semakin meningkat. Dan seluruh warga universitas semuanya memiliki suara, meskipun dalam derajat yang berbeda diutamakan.

Meningkatnya pengaruh yang dipegang oleh negara berdampak pada :

- a. Terbatasnya perguruan tinggi dan universitas dalam memerintah, mengelola serta mengurus sendiri urusan dalam ruang lingkup pendidikan tinggi.
- b. Proyek pembangunan dan penelitian semakin mahal dan membutuhkan lebih banyak dukungan keuangan dari negara, baik regional maupun nasional
- c. Pemerintah nasional menuntut suara yang lebih besar dalam urusan pendidikan tinggi.

Sejak berdirinya Republik Federal sebagai standardisasi metode pemeriksaan dan organisasi, diselenggarakanlah Konferensi Menteri Pendidikan (KMK) (di tingkat regional) dan Komite Parlemen untuk Urusan Kebudayaan (di tingkat nasional). Di waktu yang bersamaan, Konferensi 'Rektor Jerman Barat' (Westdeutsche Rektorenkonferenz) yang merupakan sebuah badan otoritatif yang menggabungkan lembaga pendidikan tinggi yang lebih berpengaruh, telah berusaha membawa kebulatan suara dalam masalah perencanaan dan kebijakan, serta mewakili kepentingan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional. Kemudian, mulai tahun 1957, 'Dewan Seni, Ilmu Pengetahuan, dan penelitian' (wissenschaftsrat) bertanggung jawab untuk merencanakan dukungan yang diberikan kepada para programer akademik dan penelitian, dan juga bertindak sebagai perantara antara lembaga pendidikan tinggi

dan administrasi regional serta nasional. Pembentukan kementerian Federal untuk urusan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 1970 mampu melakukan intervensi dalam pertanyaan umum pendidikan tinggi dan penelitian jika mereka meningkatkan kompetensi pemerintah daerah.

Tabel 2
Pendidikan Tinggi : Jumlah Institusi berdasarkan Jenisnya

	1950	1960	1970	1975	1977	1982
Universitatea (Universitas)	1	3	0	9	0	5
Kunshochschulen (sekolah tinggi seni)	8	5	7	6	6	2
Päd. Kochschulen (sekolah pelatihan guru)	8	7	2	3	1	2
Theol. Hochschulen (sekolah tinggi teologi)	6	7	4	1	1	1
Fachhochschulen (sekolah teknik)			8	56	36	7
Gesamthochschulen (institusi komprehensif)				1	1	
Total	43	52	11	66	65	06

Sumber: Westdeutsche Rektorenkonferenz, 1982/83.

Tabel 3
Pendidikan Tinggi: Jumlah Siswa Menurut Jenis Institusi
(siswa dalam ribuan)

	1950	1960	1970	1975	1977	1982
Universitas	112	217	350	552	605	781
Sekolah Tinggi Seni	5	6	11	15	15	19
Perguruan Pelatihan Guru	10	33	59	79	69	19
Sekolah Tinggi Keagamaan	5	3	2	2	2	3
Sekolah Tinggi Teknik	40	68	112	145	165	224
Institusi yang Komprehensif				43	56	75
Total	172	329	534	836	912	1121

Sumber: Statistisches Bundesamt, 1982

Peningkatan lebih dari lima kali lipat ini tidak hanya merupakan ekspresi dari minat yang tumbuh di bidang beasiswa dan pembelajaran tetapi juga menunjukkan evaluasi baru pendidikan tinggi dan tempatnya di masyarakat kita.

Karena perubahan fungsi lembaga pendidikan tinggi dari yang 'tidak terkait' penelitian kerja untuk yang diarahkan untuk penelitian kejuruan dan program pengajaran, dan juga karena sejumlah besar siswa, menjadi jelas bahwa restrukturisasi konstitusional - apakah dari profesor universitas atau tipe perguruan tinggi lainnya - sangat penting. Di universitas-universitas yang lebih tua, kepala departemen membuat keputusan sehubungan

dengan pengajaran dan penelitian dan juga masalah anggaran dan kepegawaian. Dia juga memiliki kontrol atas penganugerahan gelar dan hak anggota staf yang berkualifikasi untuk memberikan kuliah (Habilitasi).

2. Pusat Pelatihan Lain dan Pendidikan Lanjutan

Beberapa pusat pelatihan yang menawarkan kualifikasi profesional di antaranya adalah :

- a. Perguruan tinggi dan universitas
- b. Sekolah teknis dan perguruan tinggi teknis lanjutan.

Yang dimaksud dengan pendidikan lanjutan adalah pembelajaran dibawah kelembagaan yang dimulai kembali setelah mengikuti jenjang pendidikan yang telah selesai, atau setelah memiliki beberapa jenis pengalaman kerja. Kita sebagai masyarakat industri yang berubah dengan cepat, bersama-sama dengan tekanan dari pasar tenaga kerja yang berkontraksi, harus mempercepat terjadinya pengambil-alihan atas pengetahuan dan keterampilan baru karena sangat penting kaitannya di banyak pekerjaan. Oleh karena itu, peran pendidikan lanjutan semakin dirasa penting. Biasanya pendidikan lanjutan terjadi di lembaga konvensional (sekolah, sekolah teknik). Adapun pihak berwenang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perluasannya meliputi pemerintah negara,

pemerintah daerah, komunitas lokal, dan badan independen lainnya

E. Implikasi Untuk Ekonomi Dan Masyarakat

Pada akhir tahun 1950 sampai awal 1960 federasi dari beberapa negara bagian bergabung dalam melaksanakan debat internasional tentang memajukan ekonomi di sektor pendidikan. Juru bicara dalam debat hebat ini merupakan perwakilan dari sekolah Bâle (Basel) yaitu Gottfried Bombach dan Peter Widmaier. Sedangkan Friedrich Edding, Arnin Hegelheimer, Georg Picht dan Ralf Dahrendorf menjadi moderator. Dampak dari debat tersebut adalah sejak tahun 1960 an semua wilayah dari beberapa negara bagian membubarkan sekolah kelas tunggal dipedesaan dan menciptakan sistem kelas berdasarkan kelompok usia. Maka dibuatlah transformasi di pedesaan untuk kepentingan pendidikan. Sayangnya, siswa membuang banyak waktunya diperjalanan karna jarak yang jauh ke sekolah dan ini menimbulkan banyak kritik.

Pada prinsipnya dorongan modernisasi dalam sektor pendidikan ini telah diterima dengan baik. secara keseluruhan perubahan yang terjadi tahun 1960-1970 sangat tampak. Namun terdapat sebuah kasus yaitu sejumlah kecil lulusan sekolah yang ditanggihkan, yang selama bertahun-tahun hanya terdiri dari 5 persen dari jumlah siswa masuk setiap

tahunnya. Hal ini sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa, dan semua ahli sepakat bahwa itu harus dinaikkan menjadi setidaknya 15 persen.

Standar pendidikan anak-anak dan remaja ditingkatkan antara tahun 1965 dan 1976 ke tingkat yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Hellmut Backer, salah satunya. "lelaki tua agung" di panggung kultur Jerman, merangkum hasilnya dengan cara ini: Pada tahun 1965 dua kali lebih banyak anak muda mencapai "Sertifikat Menengah", dan empat kali lebih banyak yang memperoleh "Sertifikat Tinggi" di sekolah atau perguruan tinggi. Saat ini, peluang seorang anak yang berusia 20 tahun yang lahir pada tahun 1958 mencapai sebuah universitas atau perguruan tinggi adalah sekitar enam kali lebih besar daripada anak yang serupa yang lahir pada tahun 1948.

Era reformasi ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada data tercatat lebih dari lima belas tahun produk nasional khususnya bruto menunjukkan peningkatan rata-rata 4% per tahunnya, bahkan di daerah Baden-Wurttemberg mencapai angka 5%. Tetapi pada tahun 1967-1968 terjadi pemerosotan produk domestik bruto (resesi). Tetapi itu tidak berlangsung lama, pada tahun 1973 terjadi peningkatan kembali dan tahun ini dikenal sebagai "kejutan minyak". Pada akhir tahun 60-an dan 70-an

terjadi perluasan jangkauan fasilitas pendidikan secara meluas dan kompleks (kuantitatif) juga adanya upaya perubahan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat (kualitatif).

Upaya perubahan untuk mengatasi masalah sosial masyarakat (kualitatif) ini wujudkan (direalisasikan) melalui program penelitian suatu fenomena sosial yaitu melalui sistem pendidikan. Bahkan Negara Bagian maupun Daerah dihimbau untuk melaksanakan program yang melibatkan semua tingkat pendidikan (sekolah-perguruan tinggi). Bidang perencanaan ini dikoordinasikan dan dirasionalisasikan berdasarkan aturan yang dikeluarkan Federal dengan jaminan investasi ekonomi. Dan informasi ini (anteseden) digadang-gadang sudah berlaku pada tahun 1971, dengan dasar persetujuan KMK (Konferensi Menteri Pendidikan) agar perencanaan ini dapat berjalan dengan baik (komprehensif).

Bahkan karena program ini dinilai sangat penting, Federal memberlakukan program Gabungan Nasional-Regional. Alasan pemerintah memberlakukan program ini karena menyadari bahwa sejak perjanjian Dusseldorf dari KMK pada 1965 menyatakan bahwasannya saran pemikiran dan ketentuan pendidikan bernilai nol (pendidikan praktis nol). Seluruh upaya Nasional-Regional ini dilakukan karena keragu-raguan dan ketidak

pastian (skeptisisme pesimis) akan program pendidikan di negara tersebut sebagai upaya untuk mendorong perekonomian. Tetapi faktanya sistem pendidikan terkini itu untuk memelihara dan mengembangkan budaya demokrasi. Sehingga hambatan (stagnasi) pada bidang pendidikan tidak dapat dihindari.

Tetapi keseriusan pemerintah untuk menjalankan program ini terrealisasikan dengan bukti cepat meningkatnya jumlah guru. Pada tahun 1950 ada total 179.100 guru di Republik Federal, kemudian jumlahnya perlahan naik menjadi 242.500 pada tahun 1975, pada tahun ini juga terjadi tren naik dari semua proporsi peningkatan sebelumnya hingga 442.000. Dan pada tahun 1982 telah dihitung bahwa ada 565.000 guru profesional penuh waktu bekerja disekolah. Tingkat presentasi kenaikan ini dapat dibandingkan dengan angka-angka populasi nasional yang mencapai sekitar 60.000.000, dan angka-angka ini akan menjadi lebih jelas ketika ada seseorang yang meneliti suatu wilayah, dimana BadenWurtemberg dengan papulasi sekitar 9.000.000 dapat dijadikan sebuah contoh. Pada tahun 1960 DM 0,788 miliar di sediakan untuk sekolah dan lembaga pendidikan tinggi, dan daya tampung anggaran keseluruhan pada saat itu sekitar DM 30.930.000.000. Sebaliknya pada tahun 1980 kapasitas anggaran keseluruhan berjumlah DM 30.234.000.000. Dinyatakan sebagai persentase sebagai berikut : pada 1960, 30.5% dari kapasitas anggaran

yang disediakan untuk tujuan pendidikan; pada 1980 angkanya sekitar 28%.

Anggaran pada tahun 1965 sebanyak 43.965 tempat untuk sector sekolah dan 21.339 untuk sector pendidikan tinggi. Tahun 1980 dimana pertama ditingkatkan menjadi 94.730 dan terakhir 33.805 dan jika tahun 1965 dianggap 100% ini sesuai dengan peningkatan menjadi 214,6% di sector sekolah dan 158,4% di sector perguruan tinggi. Pada tahun 1956 sekitar 20.000 siswa berhasil lulus ujian negara atau memperoleh diploma Dilembaga Pendidikan Tinggi Jerman. Dari sini dapat dihitung bahwa pada tahun 1985 antara sekitar 80.000 dan 90.000 lulusan akan lulus dari lembaga ini setiap tahunnya. Proses ini mungkin akan mencapai puncaknya pada tahun 1990 sekitar 120.000 lulusan diharapkan lulus dari Lembaga Pendidikan Tinggi.

F. Kebijakan Dibandingkan Dan Dikendalikan

Di Reuplik Federal pada awal terkenalnya pendidikan. Semua fraksi politik bersatu untuk memodernisasi sekolah-sekolah dasar untuk memastikan bahwa pendidikan wajib tidak berakhir sebelum tahun sekolah kesembilan dan merevisi kurikulum di semua jenis sekolah untuk meningkatkan jumlah lulusan sekolah yang berhasil di sekolah menengah dan tata bahasa, serta untuk

mewujudkan proses pengambilan keputusan antar-daerah yang terkoordinasi.

Rencana ini diajukan pada tahun 1973. Namun, sinkronisasi yang diinginkan antara sektor pendidikan dan pekerjaan belum terwujud, karena prakiraan dan manajemen yang sesuai masih kurang. Sebagai contoh, bahwa sistematisasi statistik pendidikan di Republik Federal telah diabaikan. Bahkan sekarang kekurangan ini belum dibuat dengan baik seperti apa sistem statistik pendidikan nantinya dan fungsi apa yang harus diasumsikan dalam bidang ketegangan antara politik, administrasi, skenario dan masyarakat umum sampai sekarang tidak diklarifikasi.

Pada 1973, kebulatan suara politik telah runtuh dan kemudian menjadi jelas bahwa Jerman adalah ranah politik praktis. Sistem pendidikan tidak bisa memaksakan diri untuk semakin merosot dalam struktur dengan tingkat-terbuka setelah pola "Sekolah yang komprehensif". Berikut dua pelaku utama yang bertentangan.

1. Setelah krisis minyak pertama tahun 1973, stagnasi ekonomi yang berkepanjangan terjadi, yang mengakhiri setiap invasi dan program berskala besar di bidang pendidikan.
2. Lebih lanjut, sebagian besar, pikiran masyarakat umum tidak dapat menerima, atau merasa dibebani oleh konsep modern yang diungkapkan dalam terminologi

sosiologis yang sulit. Pendidikan anak-anak dan orang muda tetap tidak menjadi perhatian orang-orang dan menjadi peristiwa gelap bagi para ahli, yang menawarkan sendiri banyak pendapat dan gagasan yang saling bertentangan.

Secara khusus, ada dua poin utama permasalahan : ketidaksepakatan mengenai 'horizontalisasi' sistem sekolah, dan kontroversi budaya mendasar dalam hal apa yang sebenarnya diajarkan.

Di Hesse, khususnya, kelas 'orientasi' telah sepenuhnya diterapkan, seperti juga di Lower Saxony, Berlin, Hamburg dan Bremen. Situasinya sangat berbeda di selatan Main, kelas 'orientasi' sekolah tidak dapat ditemukan. Murid-murid dipindahkan ke salah satu dari tiga jenis sekolah paling tinggi setelah tahun ajaran keempat, meskipun masih mungkin untuk berpindah tanpa kesulitan besar selama dua tahun berikutnya. Bahkan di sini, meskipun, pengalaman prosedur tampaknya ambivalen dengan tenang, karena penurunan peringkat tampaknya menjadi aturan sementara, peningkatan adalah pengecualian yang agak jarang.

Materi ini memuat tentang Jangkauan sekolah kelas "orientasi" menjadi situasi yang menyatakan bahwa program eksperimental yang diajukan oleh dewan untuk Pendidikan telah dilakukan disemua daerah. Ada dua

perbedaan yaitu yang pertama sekolah komperhensif dengan jumlah yang besar telah didirikan di Negara Utara, dan yang kedua program Eksperimental telah di dirikan di Negara Selatan. Dalam situasi program Komperensif yang didirikan di Negara Utara ini berpendapat tentang pengakuan ujian akhir sekolah yang telah diadakan bertahun-tahun, dan adanya pemberian sertifikat kemahiran yang dikeluarkan oleh sekolah untuk memberikan kebebasan kepada siswa untuk meneruskan Pendidikan yang lebih tinggi.

Apa yang telah dikatakan oleh Kabinet dibawah kanselir Schmidt pada tahun 1978 tentang pengakuan kualitas akhir, sertifikat yang diberikan oleh sekolah, dan hak orang tua untuk menentukan jenis pendidikan untuk anaknya, tetapi masih belum diterbitkan sehingga anak anak yang mengikuti sekolah Komperensif di Negara Utara masih belum berubah menjadi sekolah yang Tripatit seperti di Negara Selatan yang sudah tidak banyak kesesulitan lagi. Di wilayah Utara juga guru - guru yang telah dididik dan yang memperoleh kualifikasi mereka ditolak pos mengajar di wilayah selatan, atau mereka harus mengikuti kursus studi dan ujian lebih lanjut sebelum diterima.

Adapun wilayah terbesar seperti Di north-Rhine-Westphalia (Nord-Rhine-Westfalen) di mana undang-undang sekolahnya baru saat ini dalam diskusi mematuhi sistem sekolah

dasar umum sembilan tahun. Perbedaan pendapat lainnya yaitu “Sekolah Menengah Atas” memutuskan bahwa, tahun ajaran 1976/77 paling lambat, sekolah tata bahasa yang kesebelas hingga ketiga belas harus diubah demi sistem suatu mata pelajaran. Tujuan pengubahan ini untuk mengganti kelas kelompok usia standar dengan jenis organisasi.

Selain itu ada juga perbedaan antara program wajib dan opsional, dan tiga bidang studi utama masing-masing akan terkait dengan kelompok subjek wajib, sebagai berikut : (1) bahasa, sastra, dan seni, (2) studi komunitas dan ilmu sosial, dan (3) matematika, sains dan teknologi. Agama dan olahraga akan menjadi subjek tambahan.

Salah satu kasus di sekolah tata Bahasa tradisional karena kombinasi kursus opsional dan wajib yaitu metode studi akan diajarkan sebanyak mata pelajaran yang dibutuhkan untuk kegiatan profesional atau pelatihan, setelah itu muncul beberapa kritik keras dari para politisi Pendidikan Pertengkeran utama adalah apa yang disebut 'daerah wajib'.

Baden-Wurtemberg telah menjadi wilayah pertama yang menarik kesimpulan logis dan telah mengarahkan bahwa mata pelajaran ini wajib dalam kurikulum sekolah. Terkait pertanyaan tentang organisasi - yaitu apakah sekolah harus terstruktur secara horizontal atau vertical isi pendidikan

diperebutkan dengan keras sebagai organisasinya. Yang disebut '*Hesse Basic Guide-Lines*' (*Hessischen Rahmenrichtlinien*) menandai awal perkembangannya.

- a. Tahun 1972/73, kementerian pendidikan dan kebudayaan membuat kurikulum baru yang mengarah kepada sikap murid untuk mereformasi masyarakat melawan perkembangan kapitalis.
- b. Kontroversi ini melibatkan Politisi, pendidik, asosiasi orang tua yang progresif dan konservatif.
- c. Tanggal 9 dan 10 Januari 1978 diadakan kongres "Keberanian untuk mendidik" yang diadakan di Pusat Akademi di *Bonnbedd Godesberg*.
- d. Nikolaus Lobkowicz menguraikan tujuannya, yaitu : Seseorang membutuhkan keberanian untuk meninggalkan jalan yang salah, membiarkan dirinya didorong menuju jalan yang baru.
- e. Menteri Pendidikan Mayer (*Bavaria*) dan Mayer Volverder (*Bader-Wurttenberg*) menekankan prinsip kemampuan di sekolah-sekolah.
- f. Pelatihan karakter lebih penting daripada pengetahuan.
- g. Pendidikan karakter memuat kesopanan, disiplin, keandalan, dan kemampuan beradaptasi.
- h. Sekolah, melalui fungsinya harus bekerjasama dalam menjaga nilai nilai

demokrasi, mengintegrasikan anak-anak dan remaja ke dalam Negara dan Komunitas.

Pada masa itu terjadi kemunduran dalam sistem pendidikan. Maka dari itu kepala sekolah berperan penting dalam kurikulum sekolah. Kemudian Republik Federal Jerman membagi dua kubu utama untuk dikendalikan sebagai pengaruh dan tindakan dalam bidang kebijakan pendidikan. Namun karena kesulitan, daerah-daerah yang dikendalikan berusaha mengembalikan (memutar kembali) ke tahun 1950-an dan menganjurkan pendidikan berskala serta bertingkat.

G. Kebijakan Yang Terlibat Dan Efek Sampingnya

Sudah sangat lama Jerman menjadi fitur sistem pendidikan yang juga disesuaikan dengan peminatan pasar tenaga kerja. Dengan kata lain, sekolah menengah di Jerman meletakkan fondasi seluruh sistem, dengan melayani mayoritas penduduk yaitu mereka yang diharapkan mencari nafkah dalam pekerjaan.

Pada tahun 1950-an hanya 5% yang diterima disekolah menengah tersebut. Namun karena pendidikan, adanya kemajuan selama beberapa dekade. Semakin tahun pun semakin meningkat. Tetapi yang menjadi masalah ketika kebijakan resmi menolak untuk mengetahui

kebutuhan atau fasilitas dan staf yang memadai. Salah satu efek samping dari melonggarnya kebijakan pendidikan adalah bahwa kebijakan ini telah menemukan tema sendiri dalam dilema mendasar yang tampaknya tidak ada solusi saat ini.

Sesaat sebelum jatuhnya kekuasaannya, pemerintah nasional di bawah Helmut Schmidt menuntut agar sistem pendidikan Jerman secepat mungkin menyamaratakan sistem pendidikannya baik itu sistem pendidikan kejuruan maupun sistem pendidikan tinggi. Jika semua ini dilakukan, itu akan menjadi unsur penting terutama bagi pekerjaan-pekerjaan yang dikelola oleh negara itu sendiri. Hanya orang-orang yang berpendidikan tinggi yang mendapatkan pekerjaan yang layak, sedangkan jika seseorang yang melamar hanya karena riwayat kejuruan, ia akan menempatkan posisi yang tidak terlalu penting dan ia akan kewalahan dalam menjalani tugasnya, jarang dapat naik jabatan yang berkualitas baik dan tertinggi yang merupakan prasyarat.

Pada tahun 1990 terjadi banyak pengangguran guru hal tersebut dapat terus bertambah jumlahnya karena pelatihan guru di negara tersebut kurang diperinci dan dibuat menjadi umum. Pemerintah menginginkan agar anak-anak lebih memikirkan masa depannya maka dari itu pemerintah mengadakan Sistem BAFOG

(dukungan negara untuk pendidikan) di sekolah adalah untuk membantu langsung keluarga-keluarga yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah.

1. Bantuan anak-anak dihilangkan, akibatnya keluarga yang bersangkutan akan kehilangan hingga sepertiga dari pendapatan mereka. orang tua akan dipaksa untuk mengirim anak-anak mereka keluar untuk bekerja sedini mungkin - karena ada pekerjaan yang bisa didapat.
2. Mendidik anak-anak kelas pekerja asing, akibatnya sangat sulit bagi mereka untuk mencapai standar yang diharapkan dari mereka oleh sistem pendidikan negara ini. Hanya sedikit yang berhasil menyelesaikan pendidikan formal. Pada tahun 1979 ada 551.600 anak asing di sekolah serba dan 75.900 di sekolah kejuruan. Secara keseluruhan, total 627.500 anak-anak asing mengambil keuntungan dari peluang pendidikan Jerman Barat, 46 persen di antaranya adalah Turki, 13 persen Italia, 10 persen Yugoslavia, 9 persen Yunani, 4 persen Spanyol, dan 3 persen Portugis.
3. Republik Federal Jerman hampir tidak berada dalam posisi untuk memanfaatkan pengalaman sebelumnya dalam masalah asimilasi orang asing. Ada, untuk istansi, tidak ada tradisi kolonial untuk jatuh kembali. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kesulitan mengintegrasikan anak-anak kelas pekerja

asing ke dalam sistem pendidikan Jerman meningkat, khususnya di daerah di mana mereka terkonsentrasi seperti Cologne, Frankfurt, Stuttgart dan Munich, dan di wilayah Ruhr dan di Berlin. Sudah ada kelas, terutama di sekolah menengah primer dan biasa, di mana anak-anak Jerman berada di minoritas.

4. Bagaimana anak Jerman dapat melestarikan identitas nasional mereka sendiri? Tentu saja ini belum norma. Masalahnya, bagaimanapun, semakin diperparah oleh fakta bahwa tanggal kelahiran Jerman telah jatuh secara drastis, sementara orang asing telah meluncur ke atas ke tingkat tinggi.
5. Pemerintah yang baru lahir telah membuatnya jelas bahwa itu akan mengintensifkan upayanya untuk meningkatkan proporsi pekerja imigran yang kembali ke negara asal mereka. Ini berarti bahwa tidak ada langkah-langkah intensif biaya, seperti yang mungkin telah membantu mengatasi situasi kritis ini, akan diambil di masa depan.
6. Muslim Ortodoks berhati-hati untuk memunculkan anak-anak mereka oleh prinsip Alquran dan juga, sayangnya, dalam doktrin sayap kanan politik mereka.
7. Dalam analisis terakhir, semuanya berkonspirasi untuk mencegah penyelesaian masalah dan untuk mendorong efek destabilisasi pada masyarakat.
 - a. Banyak orang yang tidak peduli dengan masalah ini, tetapi banyak juga upaya yang

telah dilakukan untuk mengubah situasi. Semisal Institut Nasional mengadakan pelatihan kejujuran untuk mengembangkan pendidikan kejujuran dan telah mengadakan program akademik dan praktis untuk mencoba dan membuat kemajuan dalam bidang tersebut.

Saat ini sebuah proyek sedang berlangsung di beberapa negara yang berkaitan dengan pelatihan anak-anak asing sebagai pekerja terampil dan pengrajin. Proyek ini bekerjasama dengan pemerintah yang bertujuan untuk membiasakan orang, sebagian instruktur di sekolah dan kepala perusahaan dan faktor dengan keunikan anak muda dari negara lain. Keahlian pendidikan, psikologis dan sosiologis dapat diterapkan pada pelatihan dan menanamkan pengetahuan teknis, matematika yang diperlukan, dan keterampilan praktis sehingga berhasil diselesaikan. Suatu hari nanti terdapat inisiatif

yang dapat dipecahkan untuk memenuhi kebutuhan semua anak kelas pekerja asing, yaitu perangsang untuk skeptisisme dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dan politik saat ini. Inisiatif yang terisolasi ini dapat terjadi jika jumlah yang menyetujui memenuhi kebutuhan seluruh anak kelas pekerja asing lebih banyak dari pada orang yang tidak setuju. Untuk skeptisisme dengan mempertimbangkan ekonomi dan politik saat ini.

H. Dichotomi Nasional dan Lokal

Sistem pendidikan Jerman ditandai kekhasan daerah dan kekhasan lokal dan tidak dapat mementingkan dikotomi disini. Sehingga setiap daerahnya memiliki perbedaan yang disajikan secara ringkas. Setiap generasi akan mengalami penyederhanaan berlebihan, dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Terjadinya konflik budaya pada wilayah yang memiliki tradisi Prusia-sosial demokrasi yang kuat dengan wilayah tradisi Katolik yang panjang dan juga diatasi dengan pengaruh baik Hapsburg atau asal Prancis. Daerah (kelompok pertama) seperti Berlin, Hamburg, Bremen, Lower Saxony, North-RhineWestphalia dan Hesse menganggap pendidikan sebagai kunci, baik dalam memperoleh peluang yang lebih baik, lebih adil dalam komunitas, dan dalam mencapai tingkat pemenuhan diri yang lebih besar. Sebaliknya, sedangkan daerah (kelompok kedua) seperti Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz), Baden-Wurttemberg, Saarland, dan Bavaria (Bayern) lebih menekankan pentingnya menyesuaikan sekolah dan sistem pendidikan tinggi dengan kebutuhan ekonomi.
2. Perbedaan yang tercermin dalam nilai dan harapan terhadap sistem pendidikan. kelompok pertama sangat menghargai kualitas seperti kreativitas, perlindungan

yang aman atas hak individu untuk kebebasan dan sikap kritis, bertanya, terhadap masyarakat dan negara. Sedangkan kelompok kedua telah memutuskan mendukung nilai-nilai tradisional, seperti perilaku tertib dan kesediaan untuk menyesuaikan diri - singkatnya, mendukung "hukum dan ketertiban"

Terjadinya kendala eksperimen-eksperimen pendidikan karena terjadinya penolakan pada daerah yang masih kental dengan budaya. Seperti kelompok pertama tidak ingin mengubah sistem sekolah tradisional dengan perubahan radikal, tetapi mereka menganggap sekolah komprehensif sebagai alternatif penting, dan sebagai pengayaan berbagai pendidikan negara. Sedangkan kelompok kedua menolak mentah-mentah terjadinya upaya tersebut. Eksperimen tersebut dapat dicoba kembali di tahun berikutnya jika mendapat persetujuan orang tua.

Mantan advokat berorientasi ilmiah, dengan cara ini terdapat peluang pengembangan industri di masa depan berkelanjutan. Bagi Baden Wurttemberg, pembelajaran analitik-kognitif tidak memiliki peran sentral dalam pekerjaan sekolah. Kelompok pertama ingin mempertahankan tingkat perkembangan saat ini di bidang pendidikan tinggi, ketika melibatkan banyak

masalah. Kelompok kedua menempatkan penekanan yang lebih besar pada pengembangan sekolah kejuruan bahkan di daerah tersier.

Pada saat ini nampaknya argumen konservatif menang. Pembaca tanpa latar belakang pengetahuan mungkin ingin diingatkan bahwa Jerman Barat adalah negara federal, dengan tanggung jawab politik dan pendidikan dibagi antara Pemerintah Federal di Bonn dan Kementerian regional di setiap wilayah (Baden-Wurttemberg, Bavaria, Hesse, dll). Pendidikan menjadi tanggung jawab kementerian daerah. Secara garis besar tanggung jawabnya untuk :

1. Kebijakan pembangunan sekolah, pembiayaan dan hasil pelatihan guru, kurikulum sekolah, pengangkatan guru, biaya pemeliharaan perguruan tinggi juga universitas, pengangkatan dan remunerasi staf univ perguruan tinggi.
2. Pemerintah Federal memiliki pengaruh sangat kecil. Pasal 91a konstitusi Jerman, Pemerintah Federal membiayai 50 persen biaya pembangunan universitas dan peralatan awal. Juga menyediakan dana yang cukup besar untuk penelitian umum dan spesialis.
3. Bahwa pembagian tanggung jawab yang tidak merata ini tidak mengarah pada regionalisasi pendidikan yang sepenuhnya disebabkan oleh koordinasi kebijakan

antara masing-masing kementerian daerah (tidak termasuk kementerian federal) dalam Konferensi Permanen Menteri Pendidikan dan disisi lain upaya bersama untuk membuat badan koordinasi nasional.

4. Kesimpulannya orang dapat mengatakan bahwa kekuatan sistem pendidikan Jerman terletak pada perbedaannya di tingkat regional daripada kesamaannya di tingkat federal.



BAB 6

KESIMPULAN

Beberapa kesamaan dan tujuan utama kebijakan pendidikan di tujuh negara. Kerangka kerja dan hukum suatu negara harus mendominasi setiap kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah nasional. Dari tujuh negara hanya di Perancis, Jepang dan Swedia pemerintah pusat melakukan kontrol penuh atas sektor pendidikan. Untuk mengembangkan minat dalam pendidikan, sering kali terdapat kendala khususnya dalam hal keuangan. Selain itu, di beberapa negara ada yang mengharuskan pendidikan prasekolah. Misalnya, di Inggris mewajibkan

anak usia 5 tahun untuk mengikuti kegiatan prasekolah, 6 tahun di Prancis, 6 atau 7 tahun di Jerman Barat.

Negara-negara lain seperti Prancis dapat memberikan instruksi formal atau kegiatan pada anak-anak sebelum memulai sekolah formal yang berpusat pada permainan yang berhubungan dengan pendidikan. Di Prancis dan AS hampir 100 persen anak-anak memiliki pengalaman seperti itu dalam satu atau dua tahun tetapi di tempat lain penerimaan lebih rendah. Di Perancis, kebijakan sekarang mengarah pada peningkatan dalam persentase anak berusia dua tahun di suatu lembaga semi- pendidikan seperti itu sedangkan di Inggris sebagian besar dilarang oleh hukum untuk meninggalkan anak-anak dalam lingkungan seperti itu di bawah usia 3 tahun. Di semua negara, persentase anak-anak dari rumah kelas menengah yang cenderung lebih besar memiliki pengalaman seperti itu daripada anak-anak.

Sebagian besar sekolah dasar berdiskusi berkaitan dengan gaya mengajar dan metode pengajaran "progresif", di mana Inggris dianggap telah memimpin. Shipman menunjukkan, bahwa tingkat perubahan pada kenyataannya sangat terbatas. Tren serupa terhadap pendekatan yang lebih berpusat pada anak untuk mengajar di sekolah dasar terlihat jelas di setiap negara lain dan selalu memunculkan oposisi yang menunjukkan

pandangan yang mengakar. Di mana-mana ada kekhawatiran bahwa bahasa dan matematika harus tampak menarik dan relevan bagi anak-anak kecil dan juga standar prestasi tidak boleh jatuh. Khususnya di Swedia, tetapi juga di Perancis dan juga Jerman Barat, menjadi semakin umum untuk anak-anak mulai belajar bahasa asing (biasanya bahasa Inggris) ketika di sekolah dasar, sedangkan sebagian kecil sekolah di Inggris belajar bahasa Prancis dan bahkan lebih sedikit lagi di Australia atau Amerika Serikat.

Dalam jangka waktu yang lama, kebijakan pendidikan di tingkat sekolah menengah telah didominasi oleh pertanyaan pengorganisasian kembali pada jalur yang komprehensif terutama di Perancis, Swedia, Inggris dan Germany Barat, sampai batas tertentu di Australia. Sekolah menengah di AS secara tradisional berada di jalur yang komprehensif. Ketika pendidikan Jepang diatur kembali setelah perang dunia kedua, model itu secara diam-diam dimodelkan dengan pola Amerika.

Di antara negara-negara lain, Swedia merupakan implementasi yang paling awal dan paling lengkap dari prinsip komprehensivasi dapat ditemukan sejak tahun 195, seperti yang ditunjukkan Marklund, prinsip tersebut diperluas termasuk level tersier, hingga mencapai penuh demokratisasi pendidikan.

Di Jerman dengan pemerintahan sosialis-liberal mereka memperkenalkan sekolah komprehensif dan semakin sulit bagi murid atau staf pengajar untuk pindah dari satu jenis sistem sekolah ke yang lain. Di Inggris sebagian besar LEA mengadopsi prinsip komprehensif tetapi beragam pola sekolah yang satu volume baru-baru ini, setelah menggambarkan sistem sekolah di beberapa negara lain, karena Inggris hanya menandai mengajukan pertanyaan besar. Ketika beberapa LEA yang dikendalikan Konservatif dapat menolak tuntutan pemerintah pusat Perburuhan untuk menjadi komprehensif. Reaksi serupa terhadap reformasi komprehensif terjadi di Jerman Barat (sangat kuat), Australia dan Prancis.

Situasi di sekolah di tujuh negara diperumit dengan penggabungan sekolah yang terpisah, swasta, dan pengajaran kemampuan campuran. Efek gabungannya sama sekali tidak universal untuk anak-anak dari berbagai kemampuan dan dari latar belakang sosial ekonomi yang sangat berbeda untuk diajarkan bersama di kelas yang sama. Di setiap negara, kebijakan selalu menerima keberadaan sekolah swasta, biasanya gratis, dan sering dengan afiliasi agama yang kuat. Sekolah-sekolah seperti itu paling tidak terbukti di Swedia dan paling nyata di Prancis, di mana mereka memberikan pendidikan lebih dari 20 persen dari rentang usia sekolah menengah. Di Prancis dan di Inggris, sekolah yang berhubungan dengan gereja dapat memilih untuk lebih dekat

atau kurang dekat dengan sistem sekolah negeri dengan pengaturan keuangan yang berbeda-beda. Di AS, peningkatan partisipasi di sekolah swasta sesuai dengan desegregasi.

Setelah adanya keputusan Mahkamah Agung AS tahun 1954 di dewan pendidikan hukum yang digambarkan Guthrie dan Bodenhausen, menyampaikan bahwa sekolah-sekolah negeri menjadi salah satu solusi yang paling signifikan dalam sejarah bangsa. Kebijakan yang berlaku pada pendidikan di sini jelas digunakan untuk tujuan kesetaraan sosial dan menghilangkan ketidakadilan rasial. Di sisi lain, pemerintah sosialis baru di Perancis, menjanjikan perubahan besar pada status sekolah swasta. Namun, perubahan di sini lebih condong kepada terancamnya status sekolah swasta tersebut terutama yang menerima dana publik. Hal ini, bisa menjadi kenyataan karena dengan adanya sekolah-sekolah negeri masyarakat akan lebih memilih sekolah-sekolah negeri, jika dilihat dalam segi biaya pun sekolah negeri lebih murah bahkan gratis dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta.

Dalam kebijakan pendidikan di sekolah mana pun, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses penerapannya. Salah satunya, permasalahan pembagian kelas yang ditetapkan berdasarkan kemampuan si anak. Permasalahan ini terkadang menimbulkan kebingungan dalam hal penetapan

kebijakannya, misalnya di Amerika Serikat. Dalam sistem penyegaran atau segregasi akademik ini, entah dengan desain atau secara de facto, siswa umumnya akan dilacak pada saat mereka mencapai sekolah menengah (SMP).

Kebijakan pendidikan lainnya adalah kurikulum. Beberapa negara seperti Jerman Barat (khususnya bagian selatan, wilayah yang dikuasai Kristen-demokrat) Inggris (terutama setelah kembali berkuasa pemerintah konservatif pada 1979). Prancis (dalam periode pasca- Haby). Jepang (dalam revisi resmi ketiga kurikulum sejak 1977 dan seterusnya) lebih menonjol kepada penjadwalan waktu dan panggilan untuk 'Kembali ke Dasar-dasar' (slogan yang digunakan di Jerman Barat). Namun, negara Australia dan Swedia lebih tertarik pada reformasi kurikulum terperinci dalam terang perubahan ekonomi dan kebutuhan sosial.

Selain itu, kebijakan lain yang sering dijadikan sebagai bahan perbincangan adalah kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan pasca sekolah. Di masing-masing negara menghasilkan beragam institusi yang melayani rentang kemampuan, minat, jenis dan durasi kursus yang berbeda-beda. Setiap universitas di setiap negara mengambil siswa yang paling cakap, memiliki tingkat sumber daya yang paling tinggi dan memberikan kebebasan bagi diri mereka sendiri dari pemerintah untuk

mengejar spesialisasi mereka sendiri dan mengembangkan kursus mereka sendiri. Namun, dalam dekade terakhir telah ada kekhawatiran serius tentang karir masa depan mereka, kebutuhan ekonomi nasional, dan masalah pengangguran lulusan. Setiap negara berusaha untuk mengatasi hal tersebut. Seperti, di Swedia dengan adanya prinsip “komprehensif” telah paling berhasil diterapkan.

Perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lebih lanjut di semua negara menawarkan kursus teknis, berorientasi kejuruan, baik penuh waktu atau paruh waktu dalam beberapa tahun terakhir kebijakan pendidikan menjadi jauh lebih menarik. Secara paradoks, dulu pengangguran massal mendominasi pasar kerja, terutama bagi kaum muda. Pada 1980-an, dengan pengangguran massal di semua negara yang diperkirakan berlangsung selama sisa abad ke 20, beberapa orang muda yang meninggalkan sekolah atau perguruan tinggi harus menghadapi kenyataan bahwa mereka mungkin tidak pernah memiliki pekerjaan tetap.

Sistem pendidikan di tujuh negara secara luas berhasil dengan baik dengan ekspansi besar-besaran pendidikan yang terjadi kira-kira dalam periode tiga puluh tahun dari 1945, sebagai hasil dari kombinasi 'baby booms' dengan banyak peningkatan permintaan social untuk pendidikan, termasuk pendidikan yang

lebih tinggi. Usia cuti sekolah dinaikkan menjadi sekitar 16 di negara-negara pos tetapi di Jerman Barat dan di California sekitar 100 persen anak berusia 17 tahun penuh Pendidikan.

Setelah itu, tampaknya cukup tiba-tiba, mengurangi tingkat kelahiran dan tingkat tetap dalam pendidikan pasca-wajib membawa masalah baru, dengan kebijakan pendidikan yang diatasi akan jauh lebih baik. Pada saat yang sama kesuksesan ekonomi yang tinggi dan standar hidup yang meningkat pesat, terutama di Jepang, Jerman Barat. Di sana mengikuti pendanaan yang kurang baik untuk sektor pendidikan nasional. Situasi ini terjadi di setiap satu dari tujuh negara tetapi mungkin paling akut di UK.

Dalam rangkuman singkat seperti itu, tidak mungkin untuk melakukan keadilan terhadap kebijakan pendidikan yang kompleks dalam esai masing-masing negara. Isu-isu konseptual dan teoritis yang dikemukakan oleh Dr Harman memberi banyak cara pada perkembangan kebijakan di berbagai Negara menunjukkan kumulatif dan sifat alami dari proses yang terlibat. Jika masalah-masalah yang harus dihadapi oleh kebijakan pendidikan pada akhir tahun 1980-an seperti tuntutan perubahan teknologi, pengangguran massal, kesetaraan kesempatan yang lebih besar, dan

perhatian terhadap standar pendidikan, jauh dari kejelasan, bagaimana kebijakan di masing-masing negara akan menangani masalah rumit seperti itu. Diharapkan bahwa volume saat ini, dengan menyoroti pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan pendidikan selama periode terakhir, juga akan membantu dalam menjelaskan masalah-masalah tersebut di masa depan.

REFERENSI

- J.R. Hough (Editor). 1984. *Educational Policy An International Survey*. New York: St. Martin Press
- Richard Hofstadter, dkk. 2004. *Garis Besar Sejarah Amerika Serikat*. Deplu AS.
- Richard C. Schroeder. 2000. *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*. Deplu AS.
- Richard N. Current. 1965. *American History: A Survey*. New York: Alfred A. Knopf.
- Tadashi Fukutake. 1988. *Masyarakat Jepang Dewasa Ini*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

SINOPSIS

Kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah negara berpengaruh besar, tentunya banyak hal yang mungkin saja dapat diambil sisi-sisi yang sekiranya baik untuk dijadikan referensi dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pendidikan di negara kita. Ternyata sudah menjadi kultur budaya yang sangat mengakar dalam sejarah bahwa pendidikan menjadi tugas bagi keluarga dan masyarakat. oleh karena itu masyarakat tidak mau kalau pendidikan diatur oleh pemerintah pusat, bahkan oleh pemerintah negara bagian, bahkan oleh pemerintah lokal sekalipun. Masyarakat merasa memiliki hak yang sangat kuat untuk menentukan sistem pendidikan seperti apa yang paling tepat untuk masyarakat mereka.

Mereka menganggap tantangan yang dihadapi oleh setiap komunitas tidaklah sama, jadi sistem pendidikan juga tidak boleh atau tidak perlu disamakan antara satu kota dengan kota lain, antara satu state dengan state lain. Kita melihat masih terlalu banyak problema dan ketidakpuasan diseputar persoalan pendidikan ini, tetapi sebagai bangsa yang besar dan sudah tua mereka sangat berpengalaman dalam memberikan respon yang cepat dan tepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang

terjadi. Karakter ini sudah menjadi budaya bangsa yang perlu kita pelajari untuk kita ambil manfaatnya.

Tentang Penulis

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS 1



Arman Maulana, S.Sy., M.M

(email: armandjexo@gmail.com)

Dilahirkan di Bandung, Lahir pada tahun 1991. Pendidikan dasar yang ditempuhnya lulus pada tahun 2009. Gelar sarjana (S,Sy) bidang Hukum Ekonomi Syariah diperolehnya di STAI Sabili Bandung lulus pada Tahun tahun 2016. Gelar Magister Manajemen (M.M.) bidang ilmu Manajemen diperolehnya di STIE Ekuitas Bandung pada tahun 2019.

Di sela sela kesibukan dalam pekerjaan Struktural sebagai seorang Prajurit Armed berpangkat Pratu (Prajurit Satu), Lulus S1 dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung (2016), gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (2019), dan sedang melanjutkan Program Pascasarjana Doktor di Universitas Islam Nusantara Bandung.

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS 2



Siti Rosmayati, SST., M.M

(email: siti.rosmayati91@gmail.com)

dilahirkan di Cimahi, Lahir pada tahun 1991. Pendidikan dasar yang ditempuhnya lulus pada tahun 2009. Gelar sarjana (SST) bidang ilmu Kesejahteraan Sosial diperolehnya di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 2013. Gelar Magister Manajemen (M.M.) bidang ilmu Manajemen diperolehnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung.

Lulus S1 dari Bidang Sosial Jurusan Kesejahteraan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, gelar Magister Manajemen bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (2017), dan sedang melanjutkan Program Pascasarjana Doktor di Universitas Islam Nusantara Bandung.